



#2023
#KKP THRIVE

LAPORAN KINERJA

Tahun 2023

BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL

KKP

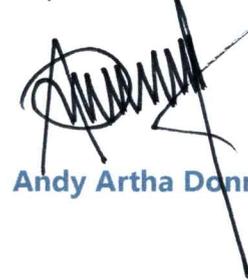
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat – Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 ini. Selanjutnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kinerja.

Jakarta, 19 Januari 2024
Kepala Biro Perencanaan



Andy Artha Donny Oktopura

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR LAMPIRAN	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Organisasi, Tugas, dan Fungsi.....	12
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan.....	12
2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan	12
C. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan	14
D. Potensi dan Tantangan	14
E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Visi dan Misi	17
B. Sasaran Kegiatan.....	17
C. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023	18
D. Program dan Kegiatan.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Analisis Capaian Kinerja.....	26
IK 1: Nilai SAKIP KKP	26
IK 2: Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk.....	32
IK 3: Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang Teregister	35
IK 4: Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan	37
IK 5: Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP	40
IK 6: Indeks Perencanaan Tahunan KKP	43
IK 7: Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP	45

IK 8: Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP	48
IK 9: Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP	49
IK 10: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP.....	53
IK 11: Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra	54
IK 12: Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak.....	57
IK 13: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan	59
IK 14: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan.....	62
IK 15: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan	65
IK 16: Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan.....	67
IK 17: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan	69
IK 18: Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.....	71
IK 19: Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	73
IK 20: Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan.....	76
C. Kinerja Anggaran	78
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
E. Capaian Kinerja Lainnya/Penghargaan	80
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	82
B. Tindak Lanjut.....	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tim Kerja pada Biro Perencanaan	13
Tabel 2. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Biro Perencanaan Tahun 2023	18
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi Kedua dan Ketiga.....	20
Tabel 4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023	24
Tabel 5. Capaian Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2017 – 2023.....	27
Tabel 6. Capaian IKU 1 2023	28
Tabel 7. Capaian IKU 2 2023	34
Tabel 8. Capaian IKU 3 2023	36
Tabel 9. Rekapitulasi Register Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Teregister pada Tahun 2023	36
Tabel 10. Matriks Perubahan - <i>Road Map</i> RB Nasional	37
Tabel 11. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023	38
Tabel 12. Capaian IKU 4 2023.....	39
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil PM Maturitas SPIP 2022-2023.....	41
Tabel 14. Capaian IKU 5 2023.....	42
Tabel 15. Rekapitulasi Penilaian Indeks Perencanaan Tahunan KKP 2022-2023	44
Tabel 16. Capaian IKU 6 2023.....	44
Tabel 17. Capaian IKU 7 2023.....	46
Tabel 18. Rekapitulasi Penilaian Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP 2023.....	46
Tabel 19. Capaian IKU 8 2023.....	48
Tabel 20. Capaian IKU 9 2023.....	51
Tabel 21. Rekapitulasi Penilaian Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP 2023	52
Tabel 22. Komponen Penilaian IPPN K/L Tahun 2023.....	53
Tabel 23. Capaian IKU 10 2023	54
Tabel 24. Capaian IKU 11 2023	55
Tabel 25. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama dan Mitra Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023.....	56
Tabel 26. Capaian IKU 12 2023	57
Tabel 27. Rekapitulasi Dokumen/Naskah Kerja Sama yang telah disetujui dan Ditandatangani Pimpinan Para Pihak selama tahun 2023.....	58
Tabel 28. Capaian IKU 13 2023	61

Tabel 29. Capaian IKU 14 2023	63
Tabel 30. Rekapitulasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023.....	65
Tabel 31. Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setjen pada Triwulan IV Tahun 2023.....	66
Tabel 32. Capaian IKU 15 2023	67
Tabel 33. Rincian Realisasi IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022" Tahun 2023	68
Tabel 34. Capaian IKU 16 2023	69
Tabel 35. Rekapitulasi Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2023.....	70
Tabel 36. Capaian IKU 17 2023	71
Tabel 37. Capaian IKU 18 2023	72
Tabel 38. Rekapitulasi Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup.....	72
Tabel 40. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II	74
Tabel 39. Capaian IKU 19 2023	75
Tabel 41. Capaian IKU 20 2023	76
Tabel 42. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023	77
Tabel 43. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan per Kegiatan Tahun 2023.....	78
Tabel 44. Efisiensi Biro Perencanaan Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kelompok Rincian Output dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KKP.....	12
Gambar 2. Nilai Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023.....	23
Gambar 3. Dokumentasi Bilateral Meeting Rencana Kerja KKP Pagu Indikatif TA 2024	47
Gambar 4. Dokumentasi Rapat Finalisasi DAK RK Fisik KKP TA 2024 Phase I.....	47
Gambar 3. Dokumentasi Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2023	50
Gambar 5. Pernyataan Komitmen Bersama Pimpinan dan Pegawai Biro Perencanaan dalam Rangka Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM yang dipajang di Lobby Ruang Kerja Biro Perencanaan	62
Gambar 6. Penyerahan Piala Penghargaan APE oleh Menteri PPPA dan Piagam Penghargaan APE KKP Tahun 2023 Kategori Mentor	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan 2023 (Awal).....	86
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi 20 Maret 2023.....	89
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi 13 April 2023 Awal	92
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi 21 November 2023.....	95
Lampiran 5. Hasil Evaluasi AKIP KKP Tahun 2022 oleh KemenPAN RB Nomor B/374/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022.....	98
Lampiran 6. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri.....	105
Lampiran 7. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja “Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister” Triwulan IV 2023.....	108
Lampiran 8. Memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1778/SJ.3/OT.710/X/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Capaian Nilai Komponen RB KKP capaian Triwulan IV lingkup Sekretariat Jenderal	110
Lampiran 9. BA Pembahasan Laporan Hasil PM Maturitas SPIP Terintegrasi KKP 2022 dan 2023 Nomor B.135/ITJ.1/HP.520/VIII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023.....	111
Lampiran 10. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Program dan Anggaran Hal Capaian IKU Tim Kerja PPA Triwulan IV.....	113
Lampiran 11. Memorandum Ketua Tim Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Perencanaan Lintas Sektor Triwulan IV Tahun 2023	114
Lampiran 12. Memorandum Ketua Tim Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP Tahun 2023	116
Lampiran 13. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 73/SJ.1/KS.310/I/2024 Hal Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama KKP dan Mitra Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023.....	118
Lampiran 14. Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 118/SJ.2/TU.210/I/2024 Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI WBK WBBM di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	119
Lampiran 15. Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023..	120
Lampiran 16. Memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor: 85/SJ.3/KP.720/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV.....	122

Laporan Kinerja Tahun 2023 Biro Perencanaan

Lampiran 17. Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 1717/SJ.2/RC.610/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023.....	126
Lampiran 18. Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 86/SJ.2/TU.210/I/2023 Tanggal 10 Januari 2024 Rekomendasi Hasil	128
Lampiran 19. Memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 20/SJ.7/TU.210/I/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Hal Capaian IKU MP	130
Lampiran 20. Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Prosun	131
Lampiran 21. Memorandum Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Nomor: 61/SJ.1/KU.520/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Penyampaian Capaian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023.....	132

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kebijakan umum, program dan anggaran, dan pengelolaan kinerja organisasi, serta kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan pada Tahun 2023 adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga; dan
3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan.

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian di tahun 2023, seluruh Indikator Kinerja pada Biro Perencanaan sudah tercapai dan melampaui target. Nilai Kinerja Organisasi Biro Perencanaan tahun 2023 sebesar **108,82** atau mengalami peningkatan 4,29 dibanding tahun 2022 sebesar **104,53**, dengan rincian sebagai berikut.

1. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja sebesar 106,33.
2. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga sebesar 111,72.
3. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan sebesar 108,41.

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp108.496.211.000,-. Adapun realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp108.171.285.936,- atau sebesar **99,70%**.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode-periode berikutnya, Biro Perencanaan akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Biro Perencanaan;
2. Melaksanakan rekomendasi dari KemenPANRB atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023;
3. Melakukan reviu terhadap penjenjangan kinerja yang telah disusun untuk memastikan hubungan setiap level kinerja sudah mempertimbangkan critical success factor (CSF) dan logical framework atas pencapaian kinerja. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan identifikasi crosscutting peran sektor lain yang mendukung untuk penyelesaian isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas capaian kinerja;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN Lingkup KKP;
5. Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I maupun Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan Lintas Sektor maupun untuk evaluasi dari rencana aksi yang telah disampaikan;
6. Melakukan Reviu Renstra KKP 2020-2024 untuk penetapan indikator di setiap level sasaran dan perbaikan Penetapan Indikator di setiap level sasaran di Dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029;
7. Melakukan pengukuran dan penetapan pada awal tahun, Bimbingan Teknis SBM, dan pemutakhiran atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Melakukan pertemuan internal secara rutin untuk membahas evaluasi atas rencana aksi IKU yang diperjanjikan Biro Perencanaan;
9. Melakukan koordinasi terkait implementasi kerja sama lingkup KKP dengan unit kerja terkait;
10. Menerapkan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) lingkup Biro Perencanaan dengan baik; dan
11. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang sudah disusun, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

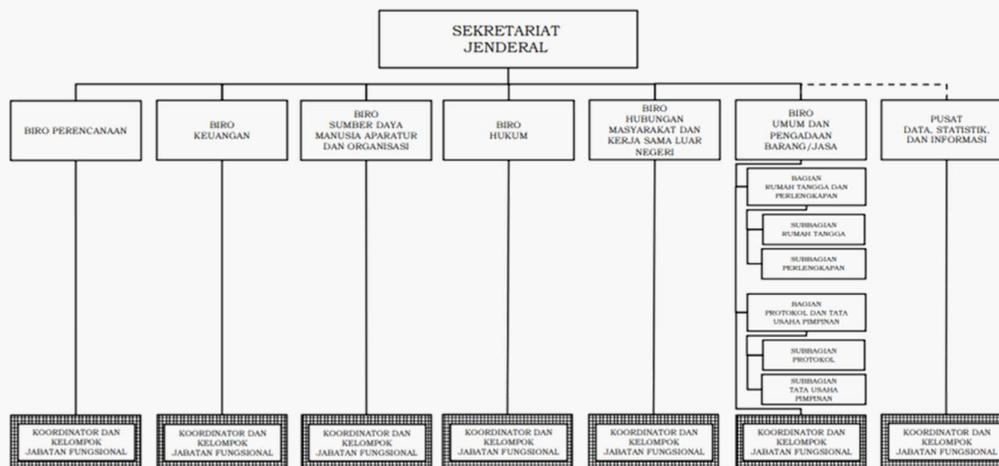
Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud akuntabilitas atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal KKP dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Organisasi, Tugas, dan Fungsi

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Biro Perencanaan sebagai salah satu unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KKP

2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Biro Perencanaan sebagai salah satu unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan kebijakan umum dan strategis serta perencanaan kawasan terpadu di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi rencana, program, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta analisis, formulasi, dan perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan dana transfer di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, serta bahan pimpinan;
- d. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Perencanaan menerbitkan Surat Tugas Nomor B.506/SJ.1/TU.110/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 yang telah diperbaharui melalui Surat Tugas Nomor B.1020/SJ.1/KP.110/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 dengan susunan Tim Kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Tim Kerja pada Biro Perencanaan

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja yang dipertanggungjawabkan
1	Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP (nilai) Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP (nilai) Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP (indeks)
2	Pengelolaan Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Perencanaan Tahunan KKP (indeks) Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP (indeks) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP (indeks)
3	Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (persen) Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (persen)
4	Pengelolaan Kinerja	Nilai SAKIP KKP (nilai)

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja yang dipertanggungjawabkan
		Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (nilai)
5	Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga	Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (persen) Persentase Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (persen)
6	Dukungan Manajerial	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan (nilai) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan (nilai) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (persen) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Biro Perencanaan (persen) Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerjasama Antarlembaga (persen) Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (persen)

C. Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan

Biro Perencanaan pada Tahun 2023 memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 68 orang pegawai, yang terdiri dari 52 orang ASN, 11 orang Tenaga Kontrak, dan 5 orang dari Jasa Perorangan Lainnya. Berdasarkan tipe jabatan, komposisi ASN pada Biro Perencanaan terdiri dari 1 orang Pejabat Struktural, 37 orang Pejabat Fungsional Tertentu, dan 14 orang Pejabat Fungsional Umum.

D. Potensi dan Tantangan

Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi dan tantangan yang dimiliki oleh organisasi. Potensi yang dimiliki oleh Biro Perencanaan antara lain:

1. Komitmen dan kerja sama seluruh pihak, baik dari level pimpinan sampai dengan pelaksana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
2. Tugas dan fungsi Biro Perencanaan yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan rencana kegiatan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP;
3. Tingginya kualifikasi pendidikan pegawai Biro Perencanaan yang sebagian besar memiliki Pendidikan setingkat Pasca Sarjana menjadi modal utama dalam menunjang penyelesaian pekerjaan dan peningkatan kinerja terutama yang terkait dengan penyusunan bahan pimpina;
4. Penataan ruang kerja pada Biro Perencanaan yang sedang berjalan diharapkan dapat membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan memadai dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran;
5. Penetapan sebagai unit kerja yang dibangun menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Tahun 2023.

Biro Perencanaan dalam melakukan tugas dan fungsinya menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. belum seluruh pegawai dapat mengikuti program peningkatan kapasitas melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam memenuhi nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) serta melengkapi ketentuan manajemen talenta pengembangan SDM aparatur;
2. belum terpenuhinya penyiapan SDM baru (kaderisasi) untuk peningkatan kompetensi SDM sebagai perencana kebijakan di bidang Kelautan Perikanan kedepannya; dan
3. perlunya pembentukan tim kerja dan keanggotaannya sesuai Analisis Beban Kinerja, serta pembentukan tim kerja dengan fungsi monitoring dan evaluasi.

E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2023 ini menyajikan capaian kinerja Biro Perencanaan berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2023 dan sesuai dengan target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan personalia, sistematika penyajian;
- ii. Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Biro Perencanaan yang telah dicapai dalam satu tahun;
- iii. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan Analisis Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan yakni **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada tahun 2020-2024 Sekretariat Jenderal menetapkan visi, yaitu **“Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah:

1. peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen; dan
2. penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diraih Biro Perencanaan sebagai suatu hasil dari *outcome* dan *impact* dari keseluruhan kegiatan yang ditanggungjawab dan dilaksanakan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci, dan dapat diukur.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kebijakan umum, program dan anggaran, dan pengelolaan kinerja organisasi, serta kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga; dan
3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan.

C. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 disahkan pada tanggal 9 Januari 2023. Pada penetapan awal Kinerja Biro Perencanaan, terdapat 2 Sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja.

Tabel 2. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 dalam Penetapan Indikator Kinerja dan Target Biro Perencanaan Tahun 2023

PK REVISI AKHIR 2022			PK AWAL 2023		KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Nilai SAKIP KKP (nilai)	82	82,48	Nilai SAKIP KKP (Nilai)	82	Mengevaluasi capaian target Nilai SAKIP KKP Tahun 2022 sebesar 82,48, dan mempertimbangkan Penerapan LKE baru dari PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka target indikator SAKIP KKP Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 yakni 82. Perubahan area dalam penilaian SAKIP yang semula 5 komponen berubah menjadi 4 komponen yakni : Aspek Perencanaan (bobot 30%), Aspek

Laporan Kinerja Tahun 2023

Biro Perencanaan

PK REVISI AKHIR 2022			PK AWAL 2023		KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
					Pengukuran (bobot 30%), Aspek Pelaporan (bobot 15%) dan Aspek Evaluasi (bobot 25%).
			Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (Persen)	<50	Usulan indikator baru
			Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (Persen)	90	Usulan indikator baru
Komponen Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (nilai)	13,32	14,2	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (Nilai)	13,32	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022
			Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP (Nilai)	1,7	Usulan indikator baru
Persentase Kerja Sama Antarlembaga yang Implementatif (persen)	75	76,63	Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (Persen)	75	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022 dengan perubahan nomenklatur
Indeks Perencanaan KKP (Indeks)	80	82,35	Indeks Perencanaan Tahunan (Indeks)	83	Indeks Perencanaan KKP menjadi IKU Eselon I. IKU ini merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Perencanaan KKP yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja Pengelolaan Program dan Anggaran.
			Indeks Perencanaan Program dan Anggaran (Indeks)	80	Usulan indikator baru
Nilai Perencanaan Lintas Sektor dan Kawasan Terpadu (nilai)	80	81,5	Nilai Perencanaan Lintas Sektor (Nilai)	83	IKU ini disederhanakan pada tahun 2023 dan menjadi tanggung jawab Tim Kerja Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor.
			Indeks Perencanaan Jangka Menengah (Indeks)	82,5	IKU ini merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Perencanaan KKP yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor
			Persentase Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (Persen)	90	Usulan indikator baru
			Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	75	Tindak lanjut Keputusan Menteri KP Nomor 149 Tahun 2023 tentang Penetapan Biro Perencanaan dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Unit Kerja yang diSbangun Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023
Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro Perencanaan (nilai)	92	98,28	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan (Nilai)	93	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Perencanaan (Indeks)	78	84,86	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (Indeks)	79	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022 dan mempertimbangkan integrasi sistem dengan BKN
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Perencanaan (persen)	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (Persen)	100	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Perencanaan (persen)	70	100	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Perencanaan (Persen)	75	Target ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penanggung Jawab IKU di level KKP dan Unit Kerja Eselon I
Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	88	99,79	Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Persen)	92	Perhitungan indikator mengalami perubahan manual perhitungan di 2023 dengan rincian : (a) Komponen keikutsertaan yang semula memiliki bobot 10% menjadi dihilangkan; (b) Komponen Dokumen bobotnya tetap sebesar 20% dan (c) Komponen Keaktifan bobotnya meningkat dari 70% menjadi 80%. Target disepakati untuk dinaikan menjadi 92.
Persentase Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerjasama Antar Lembaga (persen)	100	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (Persen)	100	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (persen)	95	99,18	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (Persen)	95	Target disusun berdasarkan hasil capaian tahun 2022

Biro Perencanaan sepanjang tahun 2023 telah melakukan tiga kali revisi Perjanjian Kinerja.

1. Revisi Pertama, disahkan pada tanggal 20 Maret 2023. Revisi PK ini mengubah nomenklatur dan target IKU " Persentase Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak" dengan target 90 menjadi IKU " Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak" dengan target 95.
2. Revisi Kedua, disahkan pada tanggal 13 April 2023. Revisi PK ini merupakan pemutakhiran terkait pergantian Kepala Biro Perencanaan.
3. Revisi Ketiga, disahkan pada tanggal 21 November 2023. Revisi ini merupakan tindak lanjut penetapan Kepmen KP 43/2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi dengan perubahan nomenklatur Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan target, serta penambahan 1 Sasaran Kegiatan.

Biro Perencanaan telah memperjanjikan 3 Sasaran Kegiatan dan 20 target IKU dengan Sekretaris Jenderal KKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 setelah Revisi Ketiga 21 November 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi Kedua dan Ketiga

PK REVISI 13 APRIL 2023					PK REVISI 21 NOVEMBER 2023				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	1 Nilai SAKIP KKP (Nilai)	82	1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	1 Nilai SAKIP KKP (Nilai)	83				
	2 Persentase Proyek PHLN yang berstatus At Risk (Persen)	<50		2 Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk (Persen)	<50				
	3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (Persen)	90		3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (Persen)	90				
	4 Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (Nilai)	13,32		4 Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (Nilai)	13,32				
	5 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP	1,7		5 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP	1,7				

Laporan Kinerja Tahun 2023
Biro Perencanaan

PK REVISI 13 APRIL 2023			PK REVISI 21 NOVEMBER 2023		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	(Nilai)			KKP (Nilai)	
	6 Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (Persen)	75			
	7 Indeks Perencanaan Tahunan (Indeks)	83		6 Indeks Perencanaan Tahunan KKP (Indeks)	83
	8 Indeks Perencanaan Program dan Anggaran (Indeks)	80		7 Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP (Indeks)	80
	9 Nilai Perencanaan Lintas Sektor (Nilai)	83		8 Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP (Nilai)	83
	10 Indeks Perencanaan Jangka Menengah (Indeks)	82,5		9 Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP (Indeks)	83
	11 Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (Persen)	95		10 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP (Indeks)	83
			2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga	11 Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (Persen)	75
				12 Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (Persen)	95
2 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	12 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	75	3 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	13 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan (Nilai)	75
	13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan (Nilai)	93		14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan (Nilai)	80,5
	14 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (Indeks)	79		15 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (Indeks)	79
	15 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (Persen)	100		16 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (Persen)	100
	16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	75		17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	75

PK REVISI 13 APRIL 2023			PK REVISI 21 NOVEMBER 2023		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Biro Perencanaan (Persen)			dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan (Persen)	
	17 Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Persen)	92		18 Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Persen)	92
	18 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (Persen)	100		19 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (Persen)	100
	19 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (Persen)	95		20 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (Persen)	95

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023

D. Program dan Kegiatan

Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP. Biro Perencanaan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama; Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN; dan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum yang dijabarkan dalam output sebagai berikut.

- a. Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- d. Layanan Perkantoran
- e. Layanan Umum

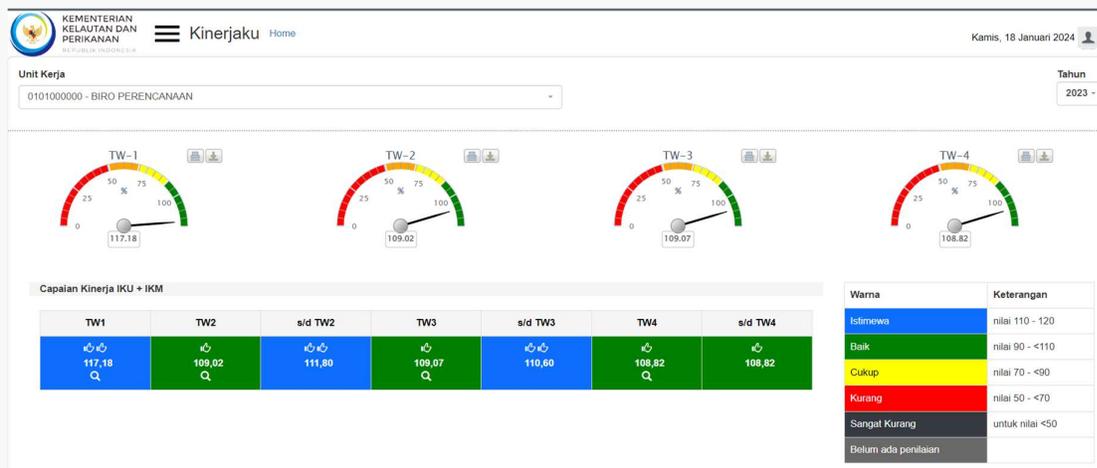
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro Perencanaan merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Kelompok Koordinator di Biro Perencanaan dengan didasarkan atas perjanjian kinerja telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Biro Perencanaan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yang dapat diakses melalui laman www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU oleh para penanggungjawab IKU.

Adapun capaian kinerja IKU Biro Perencanaan Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai **108,82%**.



Gambar 2. Nilai Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023

Terdapat 20 Indikator Kinerja yang diperjanjikan Biro Perencanaan pada Tahun 2023 yang capaiannya diukur, terdiri atas 12 IK utama dan 8 IK manajerial.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Biro Perencanaan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan		
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Kegiatan : Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN											
Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja											
1	Nilai SAKIP KKP (Nilai)	-	-	-	-	83	82.84	83	83,65	83	83,65
2	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (Persen)	-	-	-	-	-	-	<50	47	<50	47
3	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (Persen)	-	-	-	-	-	-	90	100	90	100
4	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	13.32	14.31	13.32	14.31
5	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	1.7	1.8	1.7	1.8
6	Indeks Perencanaan Tahunan KKP (Indeks)	-	-	-	-	-	-	83	89.01	83	89.01
7	Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP (Indeks)	-	-	-	-	-	-	80	81.41	80	81.41
8	Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP (Nilai)	-	-	83	83	-	-	83	83	83	83
9	Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP (Indeks)	-	-	-	-	-	-	83	85.66	83	85.66
10	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP (Indeks)	-	-	-	-	-	-	83	94,28	83	94,28
Kegiatan : Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama											
Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga											

Laporan Kinerja Tahun 2023 Biro Perencanaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
11 Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (Persen)	10	57.11	20	57.28	40	66.97	75	75	75	75
12 Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (Persen)	-	-	-	-	-	-	95	100	95	100
Kegiatan : Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum										
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan										
13 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	75	82.70	75	82.70
14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	80.5	85.4	80.5	85.4
15 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (Indeks)	-	-	72	78.8	-	-	79	87,19	79	87,19
16 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (Persen)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan (Persen)	75	100	75	75	75	75	75	100	75	100
18 Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan	92	100	92	100	92	116.67	92	133.33	92	133.33

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
yang terstandar (Persen)										
19 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga (Persen)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
20 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (Persen)	-	-	-	-	-	-	99,5	99,70	99,5	99,70

Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

B. Analisis Capaian Kinerja

IK 1: Nilai SAKIP KKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2023 diselenggarakan melalui Sistem Informasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disebut Portal RB Nasional. Portal RB Nasional dapat diakses pada tautan <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Salah satu Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi adalah Nilai SAKIP yang penilaiannya dilakukan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB. SAKIP

merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Tabel 5. Capaian Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2017 – 2023

Komponen SAKIP	Bobot	2017	2018	2019	2020	2021	Bobot	2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	26,29	26,67	26,69	26,71	26,76	30	26,84	27,03
Pengukuran Kinerja	25	21,4	21,72	21,79	21,72	21,8	30	25,20	25,39
Pelaporan Kinerja	15	12,34	12,11	12,25	12,14	12,35	15	12,45	12,69
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	8,07	8,08	8,19	8,2	8,32	25	18,35	18,54
Capaian Kinerja	20	16,49	13,06	13,15	13,2	13,25		-	-
Nilai Hasil Evaluasi	30	84,59	81,64	82,07	81,97	82,48		82,84	83,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	A	A	A		A	A

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan surat dari Menteri PAN dan RB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Nilai SAKIP KKP tahun 2023 adalah sebesar 83,65 (A) terhadap target 2023 sebesar 83 atau tercapai sebesar 100,78%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, realisasi Nilai SAKIP mengalami kenaikan sebesar 0,81. Jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, nilai SAKIP terus mengalami peningkatan dan telah mencapai 99,5% terhadap target Renstra. Oleh karena itu, Biro Perencanaan optimis bahwa target Nilai SAKIP pada tahun 2024 akan tercapai.

Tabel 6. Capaian IKU 1 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-1:	Nilai SAKIP KKP									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
84,59	81,64	82,07	81,97	82,48	82,84	83	83,65	100,78	84	99,5

Pada tahun 2022, Kementerian PANRB melakukan penilaian SAKIP pada 620 instansi dan KKP meraih predikat A bersama dengan 29 instansi lainnya. Capaian Nilai SAKIP KKP ini pada tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan Nilai SAKIP instansi-instansi lainnya di Indonesia. Keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP KKP didukung oleh beberapa upaya yang dikerjakan di tahun 2023 diantaranya:

1. Reviu dokumen perencanaan kinerja melalui validasi dan analisa SMART terhadap sasaran indikator dan target secara berjenjang untuk penyempurnaan pada perencanaan kinerja level 0 dan seluruh unit kerja.
2. Reviu dokumen perencanaan kinerja pada satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui uji petik implementasi SAKIP di UPT untuk menilai keselarasan antar dokumen perencanaan kinerja, pemenuhan kriteria indikator yang SMART, penilaian sasaran yang berorientasi hasil dan kesesuaian dengan target atasan.
3. Reviu Peta Strategi pada Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2020-2024 dengan menyesuaikan Sasaran Strategis (SS) yaitu menghapus SS ke-5 "Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan".
4. Harmonisasi revisi Permen PAN RB 69/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi dengan mengacu pada penggunaan Logical Framework sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah).
5. *Kick Off* Penjenjangan Kinerja KKP bersama Kementerian PANRB sebagai bekal dan langkah awal KKP dalam menyusun tahapan penjenjangan kinerja sesuai amanat pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Menetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP,

sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan proses validasi indikator 3 jenis validitas IKU (outcome, output kendali rendah dan output kendali tinggi) dengan masing-masing berbobot 5, 3 dan 2.
8. Penjabaran uraian fungsi masing-masing Tim Kerja dengan memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi.
9. Penilaian mandiri atas validitas IKU level II sebagai dasar perhitungan pembentukan tim kerja serta penjabaran uraian fungsi usulan tim kerja, sesuai pengaturan pada Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP.
10. Validasi atas usulan matriks penilaian mandiri indikator dan uraian fungsi dari tim kerja yang diusulkan.
11. Penetapan Surat Tugas Tim Kerja unit kerja Eselon II dengan pembagian tanggungjawab IKU dan penjabaran uraian fungsi masing-masing tim kerja.
12. Dialog Kinerja Individu untuk menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan pembentukan Tim Kerja pasca penerapan Keputusan Menteri KP Nomor 43 Tahun 2023
13. Data hasil pengukuran kinerja tahun 2022 telah dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun sasaran, indikator dan target tahun 2023 pada Dialog Kinerja Organisasi
14. Penetapan target indikator kinerja manajerial yang dimandatkan ke unit kerja Eselon I telah mempertimbangkan data capaian kinerja dan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian indikator pada tahun sebelumnya.
15. Dialog Kinerja Organisasi dalam rangka Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2023 yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II serta pelaksana

16. Hasil Pengukuran dan Verifikasi Kinerja telah disampaikan secara berjenjang dan berkala setiap Triwulanan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dan percepatan capaian kinerja unit kerja.
17. Penambahan *feedback* perbaikan pada aplikasi kinerja bentuk controlling pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki (untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang notifikasi Biru, NKO 110 s.d 120).
18. Melakukan *feedback* perbaikan atas kinerja individu sebagai salah satu bentuk controlling pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki setiap individu dalam aplikasi Kinerja BKN.
19. Penyusunan Revisi Renstra KKP 2020-2024 dengan melakukan perbaikan penetapan target kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
20. Penilaian Mandiri SAKIP Level II dan I untuk mendapatkan gambaran langkah-langkah nyata untuk perbaikan pencapaian kinerja.
21. Uji Petik Implementasi SAKIP di UPT untuk memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk peningkatan pencapaian target kinerja sampai dengan di UPT.
22. Tindak lanjut dari Rekomendasi Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2022 untuk Level 0.
23. Dialog Kinerja Organisasi dalam rangka Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2023 yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II serta pelaksana.
24. Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP yang menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian PANRB telah memberikan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas, antara lain:

1. Melakukan reuiu atas target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja di level pusat hingga unit kerja teknis di daerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan kondisi eksisting

kinerja menuju masa akhir rencana strategis sehingga target yang dimiliki telah berdasarkan pada kondisi kinerja yang riil dan sesuai dengan kebutuhan;

2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki, terutama ketika menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspektasi kinerja dan tematik yang dimiliki;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan penjenjangan kinerja yang dimiliki sebagai alat dalam menentukan tim kerja serta hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023. Pengimplementasian tersebut agar tidak hanya dilakukan oleh unit kerja yang di pusat saja, namun dapat dilakukan hingga ke setiap unit kerja teknis yang berada di daerah;
4. Mengoptimalkan kualitas pengimplementasian *crosscutting* kinerja pada setiap kondisi yang ingin diwujudkan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara melakukan pemantauan berkala atas hasil pelaksanaan dari *tagging* program yang dimiliki guna memastikan kinerja yang dihasilkan telah sesuai dengan peran dan ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, KKP agar melakukan pemetaan antara hasil kinerja yang menjadi milik Kementerian dan yang dapat diklaim oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari proses mengurangi adanya saling klaim kinerja;
5. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang sudah disusun untuk menjawab kontribusi KKP dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan telah berdasarkan pohon kinerja yang sudah disusun tersebut sehingga pemanfaatan pohon kinerja tersebut dapat selaras dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
6. Mendorong pemanfaatan hasil penilaian kinerja organisasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja individu, terutama dalam memastikan adanya peningkatan signifikan pada realisasi kinerja organisasi berdasarkan hasil kinerja setiap individu;

7. Terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan;
8. Menyempumakan kualitas informasi dalam Laporan Kinerja unit kerja dengan memastikan setiap unit kerja menginformasikan secara lengkap hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;
9. Terus mendorong pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja, baik di level pusat maupun unit kerja, terutama dalam proses menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan;
10. Mendorong peningkatan kualitas evaluasi AKIP internal dengan memastikan Inspektorat Jenderal agar menuangkan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan mengakar langsung pada akar permasalahan implementasi SAKIP setiap unit kerja ke dalam laporan hasil evaluasi internal sehingga unit kerja yang masih rendah nilai SAKIP nya dapat meningkatkan kualitas implementasinya dengan mengacu pada hasil evaluasi tersebut;
11. Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah disampaikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi, kualitas kinerja, serta perbaikan capaian kinerja pada level kementerian, terutama pada PDRB sektor perikanan.

IK 2: Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk

Untuk memberikan gambaran mengenai realisasi penyerapan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah/Project Based Sukuk (PBS), Kementerian Keuangan melakukan penyusunan Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan Project Based Sukuk setiap triwulan. IKU Persentase Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berstatus *At Risk* merupakan IKU baru di tahun 2023 yang akan

mengukur persentase proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk* pada Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan Project Based Sukuk (PBS) yang disusun Kemenkeu.

Salah satu indikator kinerja yang diukur dalam laporan dimaksud adalah menggunakan *Project Variant* (PV). PV merupakan perbandingan antara persentase penarikan (*Disbursement Ratio/DR*) dengan persentase waktu terpakai (*Elapsed Time Ratio/ETR*). Berdasarkan indikator PV, status serapan PHLN dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan yang sudah ada penarikan (*disbursed*), dan belum ada penarikan (*undisbursed*). Masing-masing status tersebut dikategorikan dalam beberapa level, yaitu:

- a. *Disbursed* (sudah ada penarikan)
 - i. *On and above schedule* ($PV \geq 1$): Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah telah sesuai, atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
 - ii. *Behind schedule* ($0,3 < PV < 1$): Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;
 - iii. *At risk* ($\leq 0,3$): Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah mengalami keterlambatan yang akut sehingga berisiko memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung APBN
- b. *Undisbursed* (belum ada penarikan)
 - i. *Behind schedule*: ($ETR \leq 70\%$ dari *Availability Period*)
 - ii. *At risk*: ($ETR > 70\%$ dari *Availability Period*)

Realisasi IKU ini diukur dengan dengan membandingkan jumlah proyek PHLN yang dikategorikan At Risk dengan jumlah proyek yang dinilai pada Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah, dan PBS Kementerian Keuangan. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja "Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk" Triwulan IV Tahun 2023, Realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 47%. Target IKU ini pada tahun 2023 adalah kurang dari 50%. Capaian IKU ini pada tahun 2023 melampaui target tahunan sebesar 106,38%. Target jangka menengah IKU ini belum tercantum dalam Renstra Sekretaris Jenderal sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

Tabel 7. Capaian IKU 2 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-2:	Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	&Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	<50	47	106,38	-	-

Sampai pada triwulan III tahun 2023 saat evaluasi ini dilaksanakan, berdasarkan hasil pemantauan oleh Kementerian Keuangan terhadap 416 kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman, terdapat 211 kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dengan rincian 51 kegiatan (24%) dengan status *on and above schedule*, 130 kegiatan (62%) *behind schedule*, dan 30 kegiatan (14%) *at risk*. Kegiatan yang mengalami keterlambatan (*behind schedule* dan *at risk*) dengan jumlah terbesar berada di Kementerian Pertahanan. Sedangkan jumlah kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman yang mengalami keterlambatan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 3 kegiatan dengan rincian 1 kegiatan *behind schedule* dan 2 kegiatan *at risk*.

Selain itu, Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 1702 hibah, terdapat 370 hibah luar negeri dengan rincian 44 hibah (12%) dengan status *on and above schedule*, 205 hibah (55%) dengan status *behind schedule*, dan 121 hibah (33%) dengan status *at risk*. Pengukuran kinerja penyerapan Hibah Luar Negeri menggunakan formula *progress variant* menunjukkan bahwa penyerapan hibah yang berada dalam kategori *On Schedule* adalah BRIN (21 kegiatan) dan Kementerian Kesehatan (6 kegiatan). Kinerja penyerapan hibah paling rendah atau yang mengalami keterlambatan paling banyak adalah pada Kementerian Kesehatan (60 kegiatan), BRIN (44 kegiatan) dan Kementerian Pertanian (36 kegiatan). Sedangkan jumlah kegiatan yang dibiayai melalui hibah yang mengalami keterlambatan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 12 kegiatan dengan rincian 7 kegiatan *behind schedule* dan 5 kegiatan *at risk*.

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan seperti melakukan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan yang dibiayai PHLN setiap triwulan dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedangkan tantangan yang

dihadapi selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri (PPLN) dalam melakukan monitoring ke lokasi proyek PHLN sehingga monitoring hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan dari Eselon I penanggungjawab proyek. Kedepannya, perlu dilakukan penambahan SDM pada Tim Kerja PPLN agar dapat melaksanakan monitoring ke lokasi proyek PHLN. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap pengelolaan pinjaman dan hibah baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun penerapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

IK 3: Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang Teregister

Sesuai dengan PP 10 Tahun 2011 Pasal 74 ayat (3) , setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan. Registrasi PHLN dilakukan sebelum melakukan pengesahan. Satker penerima PHLN harus memiliki nomor register atas PHLN yang diterima untuk mengesahkan dan melaporkan PHLN dalam laporan keuangan. KKP menerapkan kebijakan satu pintu sehingga setiap satker penerima PHLN akan melakukan permohonan pengajuan nomor register PHLN melalui Biro Perencanaan. Pendanaan Luar Negeri KKP terdiri dari Hibah dan Pinjaman. Mekanisme register untuk hibah dan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. **Hibah.** Proses registrasi hibah dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI). Aplikasi ini digunakan untuk proses pengusulan hibah sampai dengan terbitnya persetujuan register oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
2. **Pinjaman.** Proses registrasi Pinjaman dilakukan secara manual kepada Kemenkeu hingga terbitnya persetujuan register.

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja

“Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister” Triwulan IV Tahun 2023, Realisasi IKU ini adalah sebesar 100% dan telah melampaui target 90% sehingga capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 111,11%. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Target jangka menengah IKU ini juga belum tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretaris Jenderal sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

Tabel 8. Capaian IKU 3 2023

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-3:		Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	90	100	111,11	-	-	

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan seperti:

1. menyusun dan menyampaikan usulan dokumen Registrasi Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Baru;
2. pemutakhiran data hibah luar negeri; dan
3. pemantauan proses permohonan pada aplikasi SEHATI secara berkala.

Berikut merupakan rekapitulasi Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister pada aplikasi SEHATI pada tahun 2023.

Tabel 9. Rekapitulasi Register Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Teregister pada Tahun 2023

No	Hibah/ Pinjaman	Nama Proyek	Lender/Donor	Surat	Tanggal
1	Pinjaman	<i>Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)</i>	AFD	S-6/PR.8/2023	5 Januari 2023
2	Pinjaman	<i>Oceans for Prosperity Project (LAUTRA)</i>	World Bank	S-299/PR.8/2023	27 April 2023
3	Pinjaman	<i>Integrated Fishing Markets - Phase II - Preparation Project</i>	ADB	S-808/PR.8/2023	27 Desember 2023
4	Hibah	<i>Problue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project (LAUTRA)</i>	World Bank	S-300/PR.8/2023	27 April 2023

No	Hibah/ Pinjaman	Nama Proyek	Lender/Donor	Surat	Tanggal
5	Hibah	<i>The Project for Enhancement of Satellite Utilization for Monitoring Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Activity</i>	JICA	S- 417/PR.8/2023	18 Juli 2023
6	Hibah	<i>Technical Assistance on Gender Related Issues and Design and Support on The Implementation of Gender Action Plan at Eco Fishing Ports Locations</i>	AFD	S- 718/PR.8/2023	15 November 2023
7	Hibah	<i>Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia</i>	UNIDO	S- 659/PR.8/2023	5 Oktober 2023

IK 4: Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan

Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada pasal 3A diamanatkan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menyesuaikan Peraturan Menteri PANRB yang terbaru paling lambat tanggal 30 April 2023. Adapun perubahan *Road Map* RB Nasional yaitu adanya penajaman terhadap tujuan, sasaran, dan indikator reformasi birokrasi.

Tabel 10. Matriks Perubahan - *Road Map* RB Nasional

	Sebelum	Perubahan
Tujuan RB	Pemerintahan yang baik dan bersih	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik
Sasaran Strategis RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah yang bersih dan 2. akuntabel 3. Birokrasi yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif 2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional

	Sebelum	Perubahan
	kapabel	
	4. Pelayanan publik yang prima	

Pelaksanaan RB sebagaimana Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu (masalah tata kelola pemerintah/internal birokrasi), tetapi juga isu hilir (masalah yang muncul di masyarakat yang terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev RB Mikro diharapkan lebih komprehensif yang dikoordinasikan oleh Sekretariat K/L/D, sehingga antara general dan tematik tidak terkotak-kotak.

Berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KKP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melalui Memorandum Kepala Biro SDMAO Nomor 1778/SJ.3/OT.710/X/2023 Hal Penyampaian Capaian Nilai Komponen RB KKP capaian Triwulan IV lingkup Sekretariat Jenderal Tanggal 31 Oktober 2023, Biro SDMAO menyampaikan bahwa nilai hasil evaluasi dengan indeks reformasi birokrasi KKP tahun 2022 adalah 78,43 dengan kategori "BB" dengan capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023

No.	Nama Unit Organisasi	Target	Capaian Tw IV 2023
1.	Biro Perencanaan	13,32%	14,31%
2.	Biro Keuangan*	3,45%	3,66%
3.	Biro SDMAO	19,18%	20,33%
4.	Biro Hukum	4,32%	4,58%
5.	Biro Humas dan KLN	3,70%	3,92%
6.	Biro Umum dan PBJ*	1,23%	1,31%
7.	Pusdatin	13,88%	14,71%

* Non PJ Area RB

Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan adalah pada Program Penguatan Akuntabilitas. Aspek Penguatan Akuntabilitas dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KKP 2022-2023 yaitu Keterlibatan Pimpinan, meningkatnya kemampuan KKP dalam mengelola kinerja organisasi, meningkatnya kemampuan KKP dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran KKP. Realisasi IKU “Komponen Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan” ini adalah sebesar 14,31 dan telah melampaui target 13,32 sehingga capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 107,43%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 106,6%, capaian IKU ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,83%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan terus melampaui target dan telah mencapai 99% terhadap target Renstra. Oleh karena itu, Biro Perencanaan optimis bahwa target Nilai IKU ini pada tahun 2024 akan tercapai.

Tabel 12. Capaian IKU 4 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-4:	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	15,58	15,07	14,2	13,32	14,31	107,43	14,44	99

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KKP telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat beberapa peningkatan dan stagnasi kualitas hasil antara, serta penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2022. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2022, menggunakan data tahun sebelumnya. Secara keseluruhan hasil antara Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Faktor pendukung keberhasilan capaian IKU “Komponen Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan” adalah dengan tindak lanjut oleh Biro Perencanaan atas rekomendasi tahun sebelumnya dengan

melakukan pemetaan atas *gap* kompetensi AKIP untuk dapat menyusun program pengembangan kompetensi sehingga peran APIP dapat lebih optimal. Rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Biro Perencanaan di tahun berikutnya adalah melakukan reviu terhadap penjenjangan kinerja yang telah disusun untuk memastikan hubungan setiap level kinerja sudah mempertimbangkan *critical success factor* (CSF) dan *logical framework* atas pencapaian kinerja. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan identifikasi *crosscutting* peran sektor lain yang mendukung untuk penyelesaian isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas capaian kinerja.

IK 5: Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP

KKP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPI KKP yang berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Komponen penilaian Maturitas SPIP terdiri atas (a) **Penetapan Tujuan** untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; (b) **Struktur dan Proses** untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan

5 (lima) unsur SPIP; dan (c) **Pencapaian Tujuan** untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Biro Perencanaan bertanggungjawab atas Nilai Komponen Penetapan Tujuan yang memiliki bobot 40% pada Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP. Pada bulan Agustus, Tim Asesor dan Ketua Tim Penjaminan Kualitas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2022 dan 2023 telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP periode Juli 2022 s.d. Juni 2023, dan telah dilakukan pembahasan terhadap seluruh komponen penilaian, sehingga diperoleh kesepakatan nilai hasil PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP. Berikut rincian hasil penilaian PM Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2022 dan 2023 Nomor B.135/ITJ.1/HP.520/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023:

Tabel 13. Rekapitulasi Hasil PM Maturitas SPIP 2022-2023

Komponen Penilaian	Bobot Unsur (%)	Nilai	Unit PIC
Penetapan Tujuan	40	1,8	Biro Perencanaan
Struktur dan Proses	30	1,231	Biro Keuangan
Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	30	1,020	Inspektorat Jenderal
TOTAL		4.051	

Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada PM Maturitas SPIP KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan adalah sebesar 1,8 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,7. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah pada Renstra.

Tabel 14. Capaian IKU 5 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja										
IKU-5:	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP										
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	105,88	-	-	

Dalam mendukung capaian IKU “Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP”, Biro Perencanaan melakukan pembahasan penetapan tujuan dalam rangka evaluasi SPIP dengan Tim BPKP dan Inspektorat Jenderal. Biro Perencanaan melakukan ekspose terkait proses penetapan tujuan, visi misi, sasaran dan indikator di KKP mulai dari proses Renstra, Renja, sampai dengan dituangkan di perjanjian kinerja. Selain itu, Biro Perencanaan juga memaparkan proses perencanaan kinerja sampai dengan pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi Kinerjaku (penginputan sasaran, indikator, target, manual singkat, proses approve dari level di atasnya hingga penguncian data capaian).

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai IKU ini dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan IKU ini kedepannya adalah:

1. Penetapan Indikator Sasaran Strategis masih ada yang berorientasi pada output dan belum pada outcome sehingga kurang dapat berperan kepada dampak pada target yang ditetapkan dalam renstra K/L;
2. Penetapan indikator sasaran strategis sulit diturunkan ke level kegiatan atau Rincian Output karena indikator bersifat umum;
3. Sastra menjadi tidak relevan karena berbeda dengan perjanjian kinerja;
4. Terdapat perbedaan narasi antara Indikator Kinerja Sasaran Program di Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja pada Rencana Kerja KKP Tahun 2023;
5. Penetapan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah;
6. Terdapat ketidakselarasan penurunan target kinerja atas indikator Nilai ekspor hasil perikanan, dari Renja ke PK Menteri KKP RPJMN 2020 – 2024.

Kedepannya perlu dilakukan Reviu Renstra KKP 2020-2024 untuk penetapan indikator di setiap level sasaran dan perbaikan Penetapan Indikator di setiap level

sasaran di Dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 Selain itu, juga perlu ditetapkan indikator sasaran strategis yang terukur dan dapat diturunkan sampai ke unit kerja pelaksana.

IK 6: Indeks Perencanaan Tahunan KKP

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi adalah Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sampai pada awal tahun 2023, indikator ini telah dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal namun targetnya belum ditetapkan dan masih dalam proses koordinasi dengan penanggung jawab perencanaan pembangunan nasional yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Biro Perencanaan merancang Penilaian Mandiri atas Indeks Perencanaan dengan menggunakan referensi yang telah dikeluarkan oleh Bappenas dengan nama Indeks Perencanaan KKP.

Indeks perencanaan Tahunan KKP merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Perencanaan KKP dengan bobot 60%. Indeks ini mengukur kinerja penyusunan perencanaan tahunan Kementerian. Perhitungan indeks ini dilakukan oleh Biro Perencanaan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
 - a) Persentase keselarasan kegiatan pada KRISNA Renja KKP dengan RKA K/L SAKTI KKP
 - b) Persentase keselarasan kegiatan RK DAK Pagu Alokasi dengan RK Final
2. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan daerah
 - a) Persentase keselarasan nomenklatur kinerja dan indikator subkegiatan urusan KP di Provinsi dan Kabupaten
 - b) Persentase keselarasan nomenklatur DAK urusan KP dengan nomenklatur Urusan KP di Provinsi dan Kabupaten

- c) Persentase keselarasan dokumen RKPD mendukung urusan KP dengan Dokumen RKP

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Program dan Anggaran Hal Capaian IKU Tim Kerja PPA Triwulan IV, Realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 89,01 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 83. Berikut rekapitulasi penilaian Indeks Perencanaan Tahunan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan:

Tabel 15. Rekapitulasi Penilaian Indeks Perencanaan Tahunan KKP 2022-2023

INDEKS PERENCANAAN TAHUNAN		BOBOT	2022		2023	
			NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL
A	Persentase keselarasan kegiatan pada KRISNA Renja KKP dengan RKA K/L SAKTI KKP	20%	56%	0,11	69%	0,14
B	Persentase keselarasan kegiatan Rencana Kegiatan (RK) DAK Pagu Alokasi dengan RK Final	10%	94%	0,09	100%	0,10
C	Persentase keselarasan nomenklatur kinerja dan indikator subkegiatan urusan KP di Daerah	10%	100%	0,10	97%	0,10
D	Persentase keselarasan nomenklatur DAK urusan KP	10%	100%	0,10	100%	0,10
E	Persentase keselarasan dokumen RKP dengan dokumen RKPD	10%	86%	0,09	100%	0,10
		60%		0,49		0,53
TOTAL NILAI				82		89,01

Target jangka menengah IKU ini belum tercantum dalam Renstra Sekretaris Jenderal sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Perencanaan Tahunan KKP dalam perhitungan Indeks Perencanaan KKP Tahun 2022, Indeks ini mengalami kenaikan sebesar 7,01.

Tabel 16. Capaian IKU 6 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja										
IKU-6:	Indeks Perencanaan Tahunan KKP										
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	83	89,01	107,24	-	-	

Dalam mendukung capaian IKU ini pada tahun 2023, Biro Perencanaan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023;
2. Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023;
3. Koordinasi secara berkelanjutan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait untuk membahas program dan kegiatan prioritas KKP;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2023 di Triwulan III dan difinalisasi di Triwulan IV;
5. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2023 di Triwulan II dan difinalisasi di Triwulan IV;
6. Koordinasi dengan unit eselon I KKP, DJA, dan Bappenas terkait Penyusunan Renja dan RKAKL 2024, Revisi Anggaran, dan Penyusunan RK DAK 2024;
7. Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan (RK) DAK Bidang KP Tahun 2024; dan
8. Bilateral Meeting terkait evaluasi proses bisnis perencanaan DAK TA 2024.

IK 7: Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP

Indeks Perencanaan Program dan Anggaran adalah indeks yang mengukur kinerja penyusunan perencanaan program dan anggaran KKP yang dilakukan dalam satu tahun anggaran. Perhitungan indeks ini dilakukan oleh Biro Perencanaan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Persentase program KKP yang masuk dalam Prioritas Nasional
2. Persentase kegiatan DAK Bidang KP dalam APBN
3. Persentase kesesuaian kegiatan Prioritas Nasional dalam Renja dan RKAKL KKP

IKU ini merupakan IKU tahunan dan memiliki target sebesar 80. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Program dan Anggaran Hal Capaian IKU Tim Kerja PPA Triwulan IV, Realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 81,41 dan telah melampaui target. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023

dan belum dicantumkan pada Renstra sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu maupun dengan target jangka menengah.

Tabel 17. Capaian IKU 7 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-7:	Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	80	81,41	101,76	-	-

Berikut rekapitulasi penilaian Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP 2023 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan:

Tabel 18. Rekapitulasi Penilaian Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP 2023

INDEKS PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		BOBOT	NILAI	TOTAL
A	Persentase Program KKP yang masuk dalam Prioritas Nasional	40%	100%	0,40
B	Persentase Kegiatan DAK bidang KP dalam APBN	20%	7,07%	0,01
C	Persentase Kesesuaian Kegiatan PN dalam Renja dan RKA-K/L	40%	99,96%	0,40
TOTAL		100%		81,41

Dalam mendukung capaian IKU ini pada tahun 2023, Biro Perencanaan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan Dua Pihak (BM) dengan Bappenas dengan agenda tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif kementerian/lembaga;



Gambar 3. Dokumentasi Bilateral Meeting Rencana Kerja KKP Pagu Indikatif TA 2024

2. Bilateral Meeting (BM) dan Trilateral Meeting (TM) Pagu Indikatif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
3. Penyusunan Renja 2024 melalui modul sinkronisasi Renja - RKA pada aplikasi Sakti untuk pemutakhiran pada level KRO ke bawah; dan
4. Pertemuan dalam rangka penajaman menu usulan DAK yang disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan daerah.



Gambar 4. Dokumentasi Rapat Finalisasi DAK RK Fisik KKP TA 2024 Phase I

Tantangan yang dihadapi dalam memperoleh capaian IKU ini adalah penyusunan indikator kinerja yang berubah-ubah terutama pada level dukungan manajemen dan kurangnya ketaatan terhadap Standar Biaya Masukan (SBM) dalam penyusunan RKA K/L Satuan Kerja. Kedepannya, perlu dilakukan pengukuran dan

penetapan pada awal tahun, Bimbingan Teknis SBM, dan pemutakhiran atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IK 8: Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 dan merupakan pecahan dari IKU tahun 2022, Nilai Perencanaan Lintas Sektor dan Kawasan Terpadu. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 mengamanatkan kebijakan dan program kegiatan yang terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakteristik di setiap wilayah. KKP mendukung perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai target-target nasional.

Nilai perencanaan lintas sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator keberhasilan perencanaan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini dihitung oleh Biro Perencanaan dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan aspek yaitu:

1. Proses pembahasan (bobot 30%); yaitu evaluasi proses pembahasan dalam rangka penyelesaian dokumen yang dibahas bersama unit kerja KKP.
2. Penyelesaian dokumen (bobot 40%); yaitu evaluasi penyelesaian atau pemenuhan dokumen yang diminta oleh K/L lain.
3. Ketepatan waktu (bobot 30%); diukur dari ketepatan waktu penyampaian dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan oleh K/L terkait.

Tabel 19. Capaian IKU 8 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-8:	Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	81,5	83	83	100	-	-

IKU ini merupakan IKU semesteran dan memiliki target sebesar 83 pada Triwulan II dan Triwulan IV. Pada tahun 2022, Nilai Perencanaan Sektor yang menjadi komponen penilaian IKU Nilai Perencanaan Lintas Sektor dan Kawasan Terpadu adalah sebesar 82,5. Nilai IKU ini pada Triwulan II adalah sebesar 83. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor kepada Kepala Biro Perencanaan, realisasi IKU ini pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 83 dan telah mencapai target. Nilai dari IKU ini dihitung secara rata-rata dengan nilai akhir tahun 2023 sebesar 83 dan naik sebesar 1,5 dari capaian tahun sebelumnya. IKU ini belum tercantum pada Renstra sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh upaya pelaksanaan penyusunan rencana aksi dari kegiatan-kegiatan lintas sektor, pemantauan atas rencana aksi, dan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun.

IK 9: Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP

Indeks perencanaan jangka menengah merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Perencanaan KKP dengan bobot 40%. Indeks ini mengukur kinerja penyusunan perencanaan jangka menengah Kementerian. Perhitungan indeks ini dilakukan oleh Biro Perencanaan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Keselarasan/kesesuaian sasaran dan indikator kinerja jangka menengah KKP (Level 0) dengan RPJMN
2. Keselarasan/kesesuaian Program KKP dengan Program Prioritas Nasional
3. Keselarasan/kesesuaian Sasaran dan indikator sasaran program pada Renja KKP dengan Renstra KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam upaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan inklusif, perlu adanya evaluasi menyeluruh atas kebijakan-kebijakan yang telah

ada, masukan dari stakeholder kelautan dan perikanan serta penyusunan rencana strategis untuk periode 2025-2029.

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri oleh Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Unit Kerja Eselon I KKP, UPT KKP, Pemerintah Daerah dan bertujuan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan prioritas KKP Tahun 2023 (kendala, hambatan dan tantangan);
2. Merumuskan arah kebijakan, strategi, Program dan kegiatan KKP dengan menggali masukan dari Pemerintah Daerah tentang perspektif/sudut pandang program pembagunan kelautan dan perikanan yang diharapkan serta perpektif pendanaan pembangunan; dan
3. Menselaraskan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Kelautan Perikanan.



Gambar 5. Dokumentasi Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2023

Output dari Rapat Koordinasi Nasional yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rumusan kebijakan yang mendorong percepatan pelaksanaan program/kegiatan prioritas Tahun 2023;
2. Rekomendasi Kebijakan untuk penyusunan Renstra KKP Tahun 2025-2029 yang meliputi isu utama, arah kebijakan, dan formulasi strategi yang akan dilaksanakan melalui program-program pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029; dan
3. Sinkronisasi, harmonisasi dan komitmen keselarasan Program dan Kegiatan KKP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 20. Capaian IKU 9 2023

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-9:		Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	83	85,66	103,20	-	-	

IKU ini merupakan IKU tahunan dan memiliki target sebesar 83. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Pengelolaan Rencana Strategis dan Lintas Sektor kepada Kepala Biro Perencanaan, realisasi IKU ini pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 85,66 dan telah melampaui target. IKU ini bukan merupakan IKU yang dicantumkan dalam Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Berikut perhitungan Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP Tahun 2023:

Tabel 21. Rekapitulasi Penilaian Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP 2023

	INDEKS PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	BOBOT	NILAI	TOTAL
A	Keselarasn/kesesuaian sasaran indikator dan target kinerja jangka menengah KKP (Level 0) dengan RPJMN	50%	94%	47.06
B	Keselarasn/kesesuaian Program KKP dengan Program Prioritas Nasional	25%	91%	22.85
C	Keselarasn/kesesuaian Sasaran dan indikator sasaran program pada Renja KKP dengan Renstra KKP	25%	63%	15.75
	TOTAL	100%		85,66

Indeks Perencanaan Jangka Menengah ini pada perhitungan Indeks Perencanaan KKP tahun 2022 mencapai nilai sebesar 33,30 yang apabila diproporsionalkan dengan formulasi tahun 2023 setara dengan 83,25. Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Melakukan penyusunan penetapan sasaran indikator dan target kinerja untuk indikator level 0 pada dokumen Renstra sesuai dengan sasaran indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN
2. Menyusun Keselarasn/kesesuaian Program KKP dalam dokumen Renstra dengan mengacu kepada Program Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN
3. Menyusun matrik Keselarasn/kesesuaian Sasaran dan indikator sasaran program pada Renja KKP dengan Renstra KKP untuk melihat tingkat kesesuaian sasaran program dan indikator dokumen Renja dengan sasaran program dan indikator dokumen Renstra
4. Berkoordinasi dengan Bappenas sebagai pembina perencanaan dalam rangka kesesuaian Program Prioritas Nasional dengan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Berkoordinasi dengan unit kerja eselon I KKP dalam rangka penyusunan kesesuaian sasaran program pada Renja KKP dengan Renstra KKP

IK 10: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi adalah Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pada awal penyusunan Renstra 2020-2024, indikator ini telah dicantumkan namun targetnya belum ditetapkan dan perhitungannya masih dalam proses penyusunan oleh penanggung jawab perencanaan pembangunan nasional yaitu Kementerian PPN/Bappenas sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya. Biro Perencanaan merancang Penilaian Mandiri atas Indeks Perencanaan dengan menggunakan referensi yang telah dikeluarkan oleh Bappenas dengan nama "Indeks Perencanaan KKP". IKU "Indeks Perencanaan KKP" ini menjadi IKU pada Level I, dengan komponen pembentuk yang menjadi IKU pada Biro Perencanaan pada tahun 2023 ini, yaitu "Indeks Perencanaan Tahunan KKP" dan "Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP".

Pada tanggal 18 April 2023, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) dan menginisiasi pengembangan pengukuran IPPN. Pada tanggal 31 Oktober 2023, Biro Perencanaan telah mengadakan pembahasan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) dengan mengundang Narasumber dari Biro Perencanaan dan Orjala Kementerian PPN/Bappenas. Berikut merupakan komponen penilaian IPPN K/L Tahun 2023:

Tabel 22. Komponen Penilaian IPPN K/L Tahun 2023

No.	Komponen	Subkomponen	Dokumen yang dinilai
1	Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra - RPJMN
		Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	Renstra - Renja
		Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Renja - RKP
2	Sinkronisasi	Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian <i>Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan</i>	RKA - RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	RKA - Renja
		Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian <i>Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan</i>	RKA - RKP
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan Sasaran Pembangunan menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	RPJM - Renstra K/L

Pada bulan November tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah merilis nilai IPPN KKP pada website Portal RB Nasional yang dapat diakses pada tautan <https://portalrb.menpan.go.id/>. Nilai IPPN KKP pada tahun 2023 adalah sebesar 94,28 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 83 dengan capaian sebesar 113,59%. Faktor pendukung keberhasilan IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan RO dan Komponen Proyek Prioritas dan Major Project dalam RKP dengan Perencanaan K/L dan dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L. Jika KKP sudah memiliki pagu alokasi dan Bappenas Dit. KP menambah target dan output di RKP tanpa didukung dengan ketersediaan anggaran, KKP perlu mengajukan permintaan penambahan anggaran untuk mendukung penugasan baru tersebut.
2. KKP terus berkoordinasi dalam penyesuaian Renstra K/L dengan Renja K/L. Keselarasan Renstra dengan Renja perlu dipertahankan agar outcome yang ingin dicapai dalam Renstra tetap dapat tercapai.

Tabel 23. Capaian IKU 10 2023

Sasaran Kegiatan:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja									
IKU-10:	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	83	83	94,28	N/A	N/A

IK 11: Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 23/Permen-KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP.

IKU ini diukur melalui Penilaian Mandiri oleh Kelompok Koordinator Kerja Sama Antarlembaga dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian implementasi KB/NK/MSP dan persentase capaian implementasi PKS. Persentase capaian implementasi KB/NK/MSP adalah jumlah ruang lingkup yang ditindaklanjuti dibanding jumlah ruang lingkup dalam KB/NK/MSP. Capaian implementasi PKS adalah capaian output setiap kegiatan dibanding target output dalam rencana aksi.

Tabel 24. Capaian IKU 11 2023

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga									
IKU-11:		Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	78,09	85,77	76,63	75	87,03	116,04	-	-	

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan nomor 73/SJ.1/KS.310/I/2024 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama KKP dan Mitra Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023, Realisasi IKU Persentase Kerja Sama Antar Lembaga yang Implementatif pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 87,03% dan telah melampaui target 75% sehingga capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 116,04%. Realisasi IKU ini mengalami kenaikan sebesar 10,40% dari realisasi pada tahun 2022. IKU ini bukan merupakan IKU yang dicantumkan pada Renstra sehingga realisasinya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra terus melampaui target. Oleh karena itu, Biro Perencanaan optimis bahwa target Nilai IKU ini pada tahun 2024 akan tercapai.

Berikut merupakan rekapitulasi hasil evaluasi dokumen kerja sama antarlembaga di lingkup KKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023:

Tabel 25. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama dan Mitra
Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023

No	Mitra Kerja Sama KKP	Capaian (%)
1.	Kementerian/ Lembaga	87,63
2.	Pemerintah Daerah	91,60
3.	Non Kementerian/Lembaga	81,88
Rata-rata capaian kerja sama yang implementatif		87,03

Faktor pendukung tercapainya target IKU ini pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Substansi kerja sama berdasarkan pertimbangan aspek strategis dari tugas, fungsi, dan kewenangan para pihak.
2. Penyusunan naskah kerja sama telah mempertimbangkan ruang lingkup sebagai program dan koridor dalam pencapaian tujuan kerja sama, dan dilengkapi dengan matriks rencana aksi sebagai implementasi kerja sama yang realistis.
3. Kerja sama yang disepakati berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, dan saling menguntungkan.
4. Masing-masing pihak yang melakukan kerja sama, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kerja sama tersebut.
5. Masing-masing pihak saling membuka diri dan mempunyai *mindset* yang sama dalam melaksanakan kesepakatan kerja sama tersebut.
6. Implementasi kerja sama dilakukan dengan koordinasi yang bagus untuk menghindari konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki *stakeholder*.
7. Kerja Sama yang dievaluasi umumnya telah masuk pada pertengahan bahkan akhir waktu kerja sama yang disepakati.
8. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan kerja sama di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (PEMDA), dan Non Pemerintah serta Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama di Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan secara rutin.

IK 12: Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023 yang mengukur perbandingan antara jumlah dokumen/naskah kerja sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak dibandingkan jumlah keseluruhan dokumen/naskah yang diajukan kepada pimpinan. Dokumen/Naskah Perjanjian Nasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara KKP dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional. Dokumen/Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak adalah dokumen/naskah kerja sama yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan dari Para Pihak dalam Kerja Sama.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan nomor 73/SJ.1/KS.310/I/2024 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama KKP dan Mitra Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023, Realisasi IKU Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak pada Tahun 2023 adalah sebesar 100% dan telah melampaui target 95% sehingga capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 105,26%. IKU ini bukan merupakan IKU yang dicantumkan dalam Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

Tabel 26. Capaian IKU 12 2023

Sasaran Kegiatan:		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga									
IKU-12:		Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	95	100	105,26	-	-	

Berikut merupakan rekapitulasi dokumen/naskah kerja sama yang telah disetujui dan ditandatangani Pimpinan Para Pihak selama tahun 2023:

Tabel 27. Rekapitulasi Dokumen/Naskah Kerja Sama yang telah disetujui dan Ditandatangani Pimpinan Para Pihak selama tahun 2023

No.	Jenis Dokumen Kerjasama	PIC	Mulai	Berakhir	Tentang
NON PEMERINTAH					
1	KB antara KKP dan IKA UNDIP	Setjen	25 Februari 2023	25 Februari 2028	Sinergi Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
2	KB antara KKP dan PT. BRI (pesero) Tbk	Setjen	6 Maret 2023	6 Maret 2028	Pemanfaatan Jasa dan Layana Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan
3	Environmental Defend Fund (EDF)	DJPT	16 Februari 2023	16 Februari 2026	Peningkatan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Tahan Terhadap Perubahan Iklim
4	Sustainable Fisheries Partnership (SFP)	DJPT	16 Februari 2023	16 Februari 2026	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia
5	Yayasan Pesisir Lestari (YPL)	DJPRL	16/11/2023	16/11/2026	Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mnedukung Kebijakan Ekonomi Biru
PEMERINTAH DAERAH					
1	NK antara Pemda Wakatobi dan DJPDSPKP	DJPDSPKP	18 Juli 2023	18 Juli 2026	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Rumput Laut dalam rangka Modeling Hilirisasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi
2	NK antara Pemda Kab. Ciamis dan BRSDMKP	BRSDMKP	12 Juli 2023	12 Juli 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Desa Perikanan Cerdas/ <i>Smart Fisheries Village</i> Kab. Ciamis
3	NK Antara Pemda Kab. Purbalingga dan BRSDMKP	BRSDMKP	12 Juli 2023	12 Juli 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Desa Perikanan Cerdas di Kab. Purbalingga
4	NK Antara Pemda Kab. Barru dan BRSDMKP	BRSDMKP	12 Juli 2023	12 Juli 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Desa Perikanan Cerdas di Kab. Barru
5	NK antara Pemda Wakatobi dan BRSDMKP	BRSDMKP	10 Agustus 2023	10 Agustus 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Wakatobi
6	NK Antara Pemda Kab. Konawe Utara dan BRSDMKP	BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Konawe Utara
7	NK Antara Pemda Kab. Bengkulu Selatan dan BRSDMKP	BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Bengkulu Selatan
8	NK Antara Pemda Kab. Tulungagung dan BRSDMKP	BRSDMKP	19 September 2023	19 September 2026	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Tulungagung
9	NK Antara Pemda Kab.	BRSDMKP	19	19	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan

No.	Jenis Dokumen Kerjasama	PIC	Mulai	Berakhir	Tentang
	Tanah Bumbu dan BRSDMKP		September 2023	September 2026	Pembangunan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kab. Tanah Bumbu
KEMENTERIAN/LEMBAGA					
1	KB antara KKP dan Kementerian BUMN	Setjen	2 Februari 2023	2 Februari 2026	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2	NK antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan KKP	Setjen	03 April 2023	03 April 2028	Pengamanan Pelaksanaan Program Prioritas di Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kepentingan Nasional
3	NK antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan KKP	Setjen	3 Juli 2023	3 Juli 2028	Peningkatan Keamanan, Mutu, Manfaat dan Daya Saing Obat dan Makanan bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Perencanaan seperti :

1. Berkoordinasi secara terus menerus dengan Biro Hukum sebagai unit legal drafting yang melakukan reviu terhadap semua draft kerja sama dengan mitra;
2. Melakukan identifikasi terhadap dokumen kerja sama yang telah siap di tandatangani;
3. Melakukan finalisasi dokumen kerja sama lingkup KKP dengan Mitra; dan
4. Menyusun dan melaksanakan prosesi Penandatanganan (*briefnote, timeline, memorandum/nota dinas/surat*).

IK 13: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan

Dalam rangka Implementasi PermenKP No. 62/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), diperlukan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis, serta dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap KK unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman dari Kementerian PANRB. Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 149 Tahun 2023 tentang Penetapan Biro Perencanaan dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Unit Kerja yang dibangun Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023. Biro Perencanaan dalam mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyampaikan Nota Dinas kepada Plt. Inspektur Jenderal dan Inspektur V, Nomor 287/SJ/TU.210/III/2023 perihal Usulan Pembangunan Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) Tahun 2023 di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
2. Melaksanakan Rapat persiapan penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas I menuju WBK dengan mengundang Tim Inspektorat I pada tanggal 15 Mei 2023;
3. Berkoordinasi hingga ditetapkannya Keputusan MKP RI Nomor 149 Tahun 2023 Tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Biro Perencanaan dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal KKP sebagai Unit Kerja yang dibangun menuju WBK dan WBBM Tahun 2023;
4. Melaksanakan penancangan pembangunan WBK/WBBM dan penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 20 Juli 2023;
5. Melakukan rapat mekanisme pemilihan dan perubahan Tim dan rencana penancangan zona integritas menuju WBK/WBBM Biro Perencanaan dengan

melibatkan Inspektorat Jenderal, BHKLN, dan Biro Umum dan PBJ pada tanggal 14 September 2023;

6. Menetapkan Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan Nomor B.943/SJ.1/TU.110/IX/2023 Tanggal 06 September 2023 tentang Tim Pelaksana Pembangunan WBK/WBBM Biro Perencanaan;
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi SOP Biro Perencanaan;
8. Menyusun rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK Biro Perencanaan Tahun 2023 tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2023 di Hotel Courtyard by Marriott Dago, Bandung
9. Melakukan Rapat Tim Penilai; dan
10. Melakukan penilaian pembangunan WBK pada tanggal 5 sampai dengan 6 Januari 2024.

Tabel 28. Capaian IKU 13 2023

Sasaran Kegiatan:	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan										
IKU-13:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan										
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	75	82,70	110,27	-	-	

IKU ini berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 118/SJ.2/TU.210/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI WBK WBBM di lingkup Sekretariat Jenderal KKP adalah sebesar 82,70 dan telah melampaui target yang ditetapkan dengan nilai capaian 110,27%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 dan bukan merupakan IKU yang dicantumkan dalam Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah.

Biro Perencanaan meraih nilai terbaik kedua dari tiga unit lingkup Sekretariat Jenderal yang memiliki IKU ini pada tahun 2023. Adapun dua unit lain lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023 adalah Biro SDM Aparatur dan Organisasi dengan nilai 83,97 dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan nilai 81,34. Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak, baik dari level pimpinan sampai dengan pelaksana.



Gambar 6. Pernyataan Komitmen Bersama Pimpinan dan Pegawai Biro Perencanaan dalam Rangka Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM yang dipajang di Lobby Ruang Kerja Biro Perencanaan

IK 14: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan

KKP telah menjadi Kementerian yang dinilai baik dalam pengelolaan kinerjanya, sehingga perlu dijaga dan dikawal akuntabilitas kinerja dari mulai level tertinggi sampai dengan level terendah. Untuk itu diperlukan sarana untuk pengembangan manajemen pengelolaan kinerja yang baik kepada individu maupun organisasinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, LKE RB yang digunakan sebagai evaluasi hasil RB terdapat penambahan pada hasil antara area perubahan yang pengukurannya oleh instansi leading sector, semula ada 10 (sepuluh) menjadi 13 (tiga belas) nilai antara. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian pada target tahun 2022 pada seluruh unit kerja penanggungjawab area. IKU yang semula Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan berubah menjadi "Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan". Penilaian Mandiri dilakukan berpedoman pada Permen PAN RB 88/2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan pada tahun 2023 adalah sebesar 85,40 dengan predikat A dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,50.

Tabel 29. Capaian IKU 14 2023

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-14:		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	-	80,50	85,40	106,09	-	-	

Dalam mendukung capaian IKU ini, Biro Perencanaan sampai Triwulan IV tahun 2023 telah melakukan penyusunan dokumen SAKIP berupa Laporan Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Manual IKU Tahun 2023, Rincian Target IKU Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023, Validasi IKU untuk Pembentukan Tim Kerja, Penyusunan Matriks Peran Hasil Lingkup Biro Perencanaan, dan Laporan Kinerja Triwulanan Biro Perencanaan. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung dengan upaya Biro Perencanaan seperti:

1. Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja Organisasi;
2. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;
4. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja;
5. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja; dan
6. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Biro Perencanaan meraih nilai PM SAKIP 2023 terbaik keempat lingkup Sekretariat Jenderal setelah Biro Hukum, Pusdatin, dan Biro Keuangan. IKU ini bukan merupakan IKU yang dicantumkan dalam Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan target jangka menengah. Selain itu, perubahan nomenklatur dan cara pengukuran dari IKU sebelumnya menyebabkan IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 30. Rekapitulasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas					Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

IK 15: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Sehubungan dengan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna

- dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
 4. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
 5. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja; dan
 6. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor: 85/SJ.3/KP.720/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2023 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024, realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 87,19 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 79.

Tabel 31. Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setjen pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	22.50	12.50	25.00	5	65.00
2	Biro Perencanaan	21.43	35.00	25.75	5	87.19
3	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20.90	32.33	25.08	5	83.31
4	Biro Hukum	21.71	38.50	24.43	5	89.64
5	Biro HKLN	21.36	33.09	25.00	5	84.45
6	Biro Keuangan	21.10	38.39	25.00	5	89.49
7	Biro Umum dan PBJ	20.97	36.08	24.82	5	86.87
8	Pusdatin	21.09	39.34	25.07	5	90.50
9	BPISKP	22.38	35.47	23.44	5	86.28
	Total	21.49	33.41	24.84	5	84.75

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, Biro Perencanaan meraih IP ASN terbaik keempat di lingkup Sekretariat Jenderal setelah Pusdatin, Biro Hukum, dan Biro Keuangan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan telah mengalami kenaikan sebesar 2,33 dari

capaian tahun 2022 dan telah tercapai sebesar 114% terhadap target Renstra. Oleh karena itu, Biro Perencanaan optimis bahwa target Nilai IKU ini pada tahun 2024 akan tercapai.

Tabel 32. Capaian IKU 15 2023

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan								
IKU-15:		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan								
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	93,21	62,25	84,86	79	87,19	110,37	76	114

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh upaya – upaya Biro Perencanaan sebagai berikut:

1. Himbauan peningkatan nilai IP ASN kepada pegawai lingkup Biro Perencanaan dilakukan secara rutin;
2. Pemutakhiran riwayat pendidikan pegawai ke dalam aplikasi e-pegawai secara berkala;
3. Rekam data pelatihan, seminar, dan workshop pegawai ke dalam aplikasi e-pegawai secara berkala;
4. Pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan-pelatihan;
5. Pengelolaan administrasi SDM Biro Perencanaan;
6. Himbauan kepada setiap pegawai untuk mengupload data dan sertifikat yang diperoleh pada web. epegawai.kkp.go.id;
7. Verifikasi Usulan penerima Satyalencana Karya Satya (SLKS); dan
8. Revisi Analisis Beban Kerja Biro Perencanaan Tahun 2023.

IK 16: Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor 1717/SJ.2/RC.610/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 perihal Capaian IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022, tidak terdapat Temuan BPK lingkup Biro Perencanaan.

Tabel 33. Rincian Realisasi IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022" Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Biro Umum dan PBJ	475.510.832.637	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Umum dan PBJ	-	38.200.599,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Perencanaan	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Keuangan	-	30.281.900,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Hukum	-	-	≤1	0,00	0
	Biro SDMAO	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Humas dan KLN	-	-	≤1	0,00	0
	Pusdatin	-	-	≤1	0,00	0
2	LPMUKP	41.467.114.758	-	≤1	0,00	101,00
3	DEKONSETRASI	5.873.164.774	-	≤1	0,00	101,00
TOTAL		522.851.112.169,00	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99

Realisasi IKU ini tercapai 100% terhadap target tahun 2023 dan target jangka menengah pada Renstra. Dibandingkan dengan realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 100%, realisasi IKU ini pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Tabel 34. Capaian IKU 16 2023

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-16:		Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	

Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh dengan upaya sebagai berikut:

1. menerapkan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dilakukan penilaiannya setiap tahun oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Biro Perencanaan. PIPK terdiri dari Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi;
2. menyiapkan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban anggaran Tahun 2022 sesuai permintaan Tim BPK dalam rangka pemeriksaan Tim BPK dari bulan Januari sampai dengan 12 Mei 2023;
3. menindaklanjuti beberapa temuan BPK terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan konsumsi rapat dan perdin luar negeri dengan menyetor ke Kas Negera; dan
4. menyelenggarakan rapat internal dalam rangka penataan kembali tata kelola dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan lingkup Biro Perencanaan, yang akan ditegaskan melalui SK Kepala Biro Perencanaan (PPK).

IK 17: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan

Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dihitung Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Unit Kerja pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan Desember 2023. Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan melalui Memorandum Nomor

86/SJ.2/TU.210/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 perihal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV Tahun 2023.

Tabel 35. Rekapitulasi Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100	0	00,00
2.	Biro Keuangan	4	4	100	0	00,00
3.	Biro Umum dan PBJ	13	13	100	0	00,00
4.	Biro Hukum	0	0	100	0	00,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100	0	00,00
6.	Biro Humas dan KLN	0	0	100	0	00,00
7.	Pusdatin	4	4	100	0	00,00
8.	LPMUKP	1	1	100	0	00,00
9.	BPISDKP	0	0	100	0	00,00
	CAPAIAN IKU SETJEN	113	112	99,12	1	00,88

Biro Perencanaan meraih nilai 100% bersama tujuh Eselon II lainnya lingkup Sekretariat Jenderal. Realisasi IKU ini adalah sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga capaian IKU ini pada Triwulan IV Tahun 2023 ini adalah sebesar 120%. Dibandingkan dengan realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 100%, realisasi IKU ini pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Realisasi IKU ini tercapai 120% terhadap target tahun 2023 dan 125% terhadap target jangka menengah pada Renstra. Faktor keberhasilan dalam mencapai nilai IKU ini adalah Biro Perencanaan telah menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Tuntas terhadap Hasil Reviu Permohonan pembayaran Termin 4, 5 dan 6 Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) SKPT Hibah Pemerintah Jepang pada Biro Perencanaan;
2. Hasil Tuntas pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal KKP; dan
3. Hasil Tuntas pada Hasil Reviu RKA-K/L (Pagu Indikatif) TA 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP .

Tabel 36. Capaian IKU 17 2023

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-17:		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	100	100	75	100	120	80	125	

IK 18: Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Sistem manajemen pengetahuan di KKP didukung platform *Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>), dan capaian atas penerapan manajemen pengetahuan dihitung berdasarkan 2 variabel, yaitu : (1) Pemenuhan dokumen (bobot 20%) dan (2) Keaktifan (bobot 80%) dalam platform *Portal Collaboration Office*.

Tabel 37. Capaian IKU 18 2023

Sasaran Kegiatan:	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-18:	Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	62,25	95,14	99,79	92	112,50	120	90	125%

Berdasarkan Memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 20/SJ.7/TU.210/I/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Hal Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023, Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 133,33% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 92%. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 diperoleh dengan perhitungan rata-rata dari Triwulan I hingga Triwulan IV sehingga diperoleh nilai 112,50. Dibandingkan dengan capaian realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 99,79%, capaian IKU ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,71%. Realisasi IKU ini tercapai 125% terhadap target jangka menengah pada Renstra.

Tabel 38. Rekapitulasi Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Nilai Capaian Tw I 2023	Nilai Capaian Tw II 2023	Nilai Capaian Tw III 2023	Nilai Capaian Tw IV 2023	Nilai Capaian 2023(%)
1.	Biro Perencanaan	100,00	100,00	116,67	133,33	112,50
2.	Biro Humas KLN	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67
3.	Biro Keuangan	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67
4.	Biro SDMAO	100,00	99,68	100,00	133,33	108,25
5.	Biro Hukum	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67
6.	Biro Umum dan PBJ	92,59	98,25	100,00	133,33	106,04
7.	Pusdatin	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67
8.	LPMUKP	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33
	CAPAIAN IKU SETJEN	98,93	99,34	124,65	133,33	112,59

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan meraih nilai capaian terbaik kelima setelah Biro Humas dan KLN, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Pusdatin. Biro Perencanaan memperoleh capaian ini dengan melakukan upaya-upaya seperti pemenuhan dokumen *mandatory*, dan mendorong keaktifan pimpinan, koordinator, dan subkoordinator dalam melakukan pengisian pada platform Portal Collaboration Office (<https://portal.kkp.go.id>).

IK 19: Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154 Tahun 2023, terdapat 73 usulan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan kelautan dan perikanan pada tahun 2023. Biro Perencanaan memiliki indikator Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga pada tahun 2023 dengan target 6 usulan rancangan peraturan perundang-undangan.

Berikut merupakan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Biro Perencanaan yang capaian progresnya sudah 100% berdasarkan evaluasi oleh Biro Hukum.

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah ditetapkan pada tanggal 15 November 2023

2. Permohonan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM Nomor B.1073/SJ/HK.160/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Hibah Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2023
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2023 telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2023.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023.
7. Berikut merupakan rekapitulasi Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2023.

Tabel 39. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Permen/Kepmen	Persentase	Permen/Kepmen	Persentase
1	Set. Ditjen PRL	13	100.00%	13	100.00%
2	Set. Ditjen PT	4	100.00%	4	100.00%
3	Set. Ditjen PB	5	100.00%	5	100.00%
4	Set. Ditjen PDSPKP	7	100.00%	7	100.00%
5	Set. Ditjen PSDKP	6	100.00%	6	100.00%
6	Set. Itjen	-	-	-	-
7	Set. BRSDM KP	6	100.00%	6	100.00%
8	Set. BKIPM	7	100.00%	7	100.00%
9	Biro Perencanaan	6	100.00%	6	100.00%
10	Biro Keuangan	3	100.00%	3	100.00%
11	Biro SDMAO	6	100.00%	6	100.00%
12	Biro Hukum	1	100.00%	1	100%
13	Biro HKLN	1	100.00%	1	100%
14	Biro Umum dan PBJ	-	-	-	-
15	Pusdatin	6	100.00%	6	100%

Dalam mendukung capaian IKU ini, Biro Perencanaan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Biro Hukum atas rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Biro Perencanaan;
2. Menyiapkan Kajian tertulis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; dan
4. Melakukan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan unit kerja Eselon I dan intansi terkait lainnya.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, Biro Hukum sudah melakukan evaluasi atas progres penyusunan peraturan perundang-undangan dan seluruh unit telah menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangannya dengan capaian 100%. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II, capaian IKU ini pada Biro Perencanaan adalah sebesar 100%.

Tabel 40. Capaian IKU 19 2023

Sasaran Kegiatan:	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-19:	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-

Dibandingkan dengan capaian realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 100%, capaian IKU ini pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. IKU ini bukan merupakan IKU yang dicantumkan dalam Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

IK 20: Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan

IKU Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan merupakan capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan. Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Perencanaan.

Tabel 41. Capaian IKU 20 2023

Sasaran Kegiatan:		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan									
IKU-20:		Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan									
Realisasi 2017-2022						Tahun 2023			Renstra Setjen 2020-2024 (Kep SJ No. 17/2020)		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%Realisasi	Target 2024	%Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	-	-	99,18	95	99,70	104,95	-	-	

Capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 99,70%. IKU ini merupakan IKU tahunan dengan target sebesar 95%. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Nomor: 61/SJ.1/KU.520/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Penyampaian Capaian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Aplikasi SAKTI Per 30 September 2023, Realisasi anggaran Biro Perencanaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 99,70% atau sebesar Rp108.171.285.936,- dari pagu anggaran sebesar Rp108.496.211.000,-. Dibandingkan dengan realisasi IKU ini pada tahun 2022, realisasi IKU ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,52%. IKU ini bukan merupakan IKU yang dicantumkan dalam Renstra sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Dibandingkan Eselon II lainnya lingkup Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan meraih capaian tertinggi pada IKU ini. Berikut merupakan realisasi anggaran lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 berdasarkan data aktual Aplikasi SAKTI Tahun 2023.

Tabel 42. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

UNIT ESELON II	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
Biro Hukum	Rp13.001.664.000	Rp12.912.457.558	Rp89.206.442	99,31%
Biro Humas Dan KLN	Rp24.281.262.000	Rp24.125.714.981	Rp155.547.019	99,36%
Biro Keuangan	Rp12.737.230.000	Rp12.648.294.252	Rp88.935.748	99,30%
Biro Perencanaan	Rp108.496.211.000	Rp108.171.285.936	Rp324.925.064	99,70%
Biro Sdmao	Rp14.609.428.000	Rp14.388.513.128	Rp220.914.872	98,49%
Biro Umum dan PBJ	Rp280.497.365.000	Rp278.496.033.446	Rp2.001.331.554	99,29%
Pusdatin	Rp115.753.575.000	Rp114.767.220.348	Rp986.354.652	99,15%
	Rp569.376.735.000	Rp565.509.519.649	Rp3.867.215.351	99,32%

Rincian realisasi Biro Perencanaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran yang berasal dari APBN adalah sebesar 99,31% atau sebesar Rp23.944.855.193,- dari pagu sebesar Rp24.111.029.000,-;
2. Realisasi Anggaran yang berasal dari Hibah Pemerintah Jepang adalah sebesar 99,81% atau sebesar Rp84.226.430.743,- dari pagu sebesar Rp84.385.182.000,-.

Berapa hal yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dalam mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- a. koordinasi internal secara rutin dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan;
- c. revisi anggaran untuk optimalisasi penggunaan anggaran dengan memperhatikan kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan;
- d. koordinasi intensif dengan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, terkait pengadaan Barang/Jasa supaya dapat dilaksanakan tepat waktu;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi;
- f. khusus untuk dana Hibah langsung, Biro Perencanaan intensif melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Eselon I terkait, untuk pelaksanaan kegiatan

- yang bersumber dari dana Hibah terutama dalam proses pencantuman besaran dana hibah dalam DIPA Tahun 2023 supaya tidak mengalami keterlambatan;
- g. peningkatan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan anggaran dengan mengikuti diklat dan sosialisasi tentang aturan-aturan yang terkait. (laporan mingguan); dan
 - h. menyusun Draft SOP Rencana Kegiatan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Biro Perencanaan.

C. Kinerja Anggaran

Biro Perencanaan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama; Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN; dan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum yang dijabarkan dalam rincian output yaitu: (a) Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga; (b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; (c) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; (d) Layanan Perkantoran ; (e) Layanan Umum.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 99,70% atau sebesar Rp108.171.285.936,- dari pagu anggaran sebesar Rp108.496.211.000,-. Rincian realisasi Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Anggaran yang berasal dari **APBN** adalah sebesar 99,31% atau sebesar Rp23.944.855.193,- dari pagu sebesar Rp24.111.029.000,-; dan
- 2) Realisasi Anggaran yang berasal dari **Hibah Pemerintah Jepang** adalah sebesar 99,81% atau sebesar Rp84.226.430.743,- dari pagu sebesar Rp84.385.182.000,-.

Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 43. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan per Kegiatan Tahun 2023

URAIAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%REALISASI	TERSEDIA
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	97.521.285.000	97.291.319.602	99,76%	97.521.285.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.099.918.000	4.082.961.574	99,59%	4.099.918.000
Kesepakatan Kerja Sama Antarlembaga	2.332.369.000	2.302.091.631	98,70%	2.332.369.000

URAIAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%REALISASI	TERSEDIA
Layanan Umum	2.564.434.000	2.550.814.491	99,47%	2.564.434.000
Layanan Perkantoran	1.978.205.000	1.944.098.638	98,28%	1.978.205.000
TOTAL	108.496.211.000	108.171.285.936	99,70%	108.496.211.000

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi :

- Data capaian atas pelaksanaan Rincian Output (RO)
- Data alokasi anggaran per Rincian Output (RO)
- Data realisasi anggaran per Rincian Output (RO)

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi APBN Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 99,31% sedangkan rata-rata capaian *output* dari masing-masing kegiatan berdasarkan Rincian Output (RO) sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi dan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target Rincian Output terdapat efisiensi sebesar Rp704.882.669 atau sebesar 0,59%. Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pencapaian Rincian Output (RO) dibandingkan dengan realisasi anggaran per Rincian Output (RO):

Tabel 44. Efisiensi Biro Perencanaan Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kelompok Rincian Output dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	RO	Target			Realisasi				Efisiensi		
		RO	Anggaran Per RO	Alokasi Anggaran	RO	RO	Anggaran Per RO	% Realisasi RO	Realisasi RO	Efisiensi per RO	Efisiensi Total
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7	13.136.103.000	Rp91.952.721.000	7	13.064.888.859	Rp91.454.222.013	100,00%	7	Rp71.214.141	Rp498.498.987
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	4.099.918.000	Rp16.399.672.000	4	4.082.961.574	Rp16.331.846.296	100,00%	4	Rp16.956.426	Rp67.825.704
3	Kesepakatan Kerja Sama Antarlembaga	3	2.332.369.000	Rp6.997.107.000	3	2.302.091.631	Rp6.906.274.893	100,00%	3	Rp30.277.369	Rp90.832.107
4.	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Biro Perencanaan	1	2.564.434.000	Rp2.564.434.000	1	2.550.814.491	Rp2.550.814.491	100,00%	1	Rp13.619.509	Rp13.619.509
5.	Layanan Perkantoran	1	1.978.205.000	Rp1.978.205.000	1	1.944.098.638	Rp1.944.098.638	100,00%	1	Rp34.106.362	Rp34.106.362
	Jumlah (Rp)	16	Rp24.111.029.000	Rp119.892.139.000	16	Rp23.944.855.193	Rp119.187.256.331	100,00%	16	Rp166.173.807	
	Nilai Efisiensi (Rp)										Rp704.882.669
	Persentase Efisiensi (%)										0,59%

Efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Biro Perencanaan melalui melalui koordinasi dan integrasi lingkup Biro Perencanaan, pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi *sharing* informasi melalui penyimpanan bersama (*Google workspace*) Biro Perencanaan, dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta pencapaian kinerja organisasi secara berkala.

E. Capaian Kinerja Lainnya/Penghargaan

Salah satu kegiatan Lintas Sektor yang dikoordinasi oleh Biro Perencanaan adalah implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh KKP dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender antara lain kegiatan sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, pengembangan prasarana dan sarana responsif Gender, dan bimbingan teknis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam siklus proses pembangunan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. Kategori penerima APE adalah: Pratama (pemula), Madya (pengembangan), Utama (peletakan dasar dan keberlanjutan) dan Mentor. KKP memperoleh penghargaan APE dengan Predikat Pratama pada tahun 2012, predikat Madya pada tahun 2014, dan predikat Utama pada tahun 2016, dan Predikat Mentor pada tahun 2018. KKP kembali menerima Penghargaan APE Predikat Mentor pada tahun 2023



Gambar 7. Penyerahan Piala Penghargaan APE oleh Menteri PPPA dan Piagam Penghargaan APE KKP Tahun 2023 Kategori Mentor

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2023, Biro Perencanaan mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian di tahun 2023, seluruh Indikator Kinerja pada Biro Perencanaan sudah tercapai dan melampaui target. Nilai Kinerja Organisasi Biro Perencanaan tahun 2023 sebesar **108,82** atau mengalami peningkatan 4,29 dibanding tahun 2022 sebesar **104,53**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja sebesar **106,33**.
 - b. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Antarlembaga sebesar **111,72**.
 - c. Nilai Kinerja Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan sebesar **108,41**.
2. Pada tahun 2023, Biro Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp108.496.211.000,-. Adapun realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp108.171.285.936,- atau sebesar **99,70%**. Rincian realisasi Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Anggaran yang berasal dari APBN adalah sebesar 99,31% atau sebesar Rp23.944.855.193,- dari pagu sebesar Rp24.111.029.000,-;
 - b. Realisasi Anggaran yang berasal dari Hibah Pemerintah Jepang adalah sebesar 99,81% atau sebesar Rp84.226.430.743,- dari pagu sebesar Rp84.385.182.000,-;

3. Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi APBN Biro Perencanaan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 99,31% sedangkan rata-rata capaian output dari masing-masing kegiatan berdasarkan Rincian Output (RO) sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi dan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target Rincian Output terdapat efisiensi sebesar Rp704.882.669 atau sebesar 0,59%.
4. Pada tahun 2023, KKP mendapat penghargaan kategori mentor pada penyerahan oleh Menteri KPP-PA dengan diterima oleh Sekjen sebagai perwakilan MKP. Kategori mentor merupakan kategori tertinggi pada APE dimana untuk tahun 2023 yang mendapatkan ketegori yang sama untuk K/L ada 3 yaitu KKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

B. Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan pada periode-periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penyusunan tim kerja dan susunan keanggotaan sesuai Analisis Beban Kerja;
2. Mendorong kualitas SDM Biro Perencanaan melalui pelatihan, diklat, dan seminar-seminar;
3. Memberikan apresiasi dan penghargaan untuk memberikan motivasi kepada pegawai untuk terus meningkatkan kinerja;
4. Melaksanakan rekomendasi dari KemenPANRB atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023;
5. Penambahan SDM pada Tim Kerja PPLN agar dapat melaksanakan monitoring ke lokasi proyek PHLN;
6. Melakukan reviu terhadap penjenjangan kinerja yang telah disusun untuk memastikan hubungan setiap level kinerja sudah mempertimbangkan

critical success factor (CSF) dan *logical framework* atas pencapaian kinerja. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan identifikasi *crosscutting* peran sektor lain yang mendukung untuk penyelesaian isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas capaian kinerja.

7. Penambahan SDM pada Tim Kerja PPLN agar dapat melaksanakan monitoring ke lokasi proyek PHLN. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap pengelolaan pinjaman dan hibah baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun penerapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.
8. Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I maupun Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan Lintas Sektor maupun untuk evaluasi dari rencana aksi yang telah disampaikan.
9. Melakukan Reviu Renstra KKP 2020-2024 untuk penetapan indikator di setiap level sasaran dan perbaikan Penetapan Indikator di setiap level sasaran di Dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 Selain itu, juga perlu ditetapkan indikator sasaran strategis yang terukur dan dapat diturunkan sampai ke unit kerja pelaksana.
10. Melakukan pengukuran dan penetapan pada awal tahun, Bimbingan Teknis SBM, dan pemutakhiran atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Melakukan pertemuan internal secara rutin untuk membahas evaluasi atas rencana aksi IKU yang diperjanjikan Biro Perencanaan.
12. Melakukan koordinasi terkait implementasi kerja sama lingkup KKP dengan unit kerja terkait.
13. Menerapkan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) lingkup Biro Perencanaan dengan baik.
14. Terus melakukan pemutakhiran data terkait riwayat pendidikan, pelatihan, seminar/workshop yang pernah diikuti oleh pegawai Biro Perencanaan dalam aplikasi e-Pegawai serta menghimbau para pegawai

untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang ada.

15. Mempertahankan keaktifan partisipasi pegawai dan pemenuhan dokumen pada aplikasi Manajemen Pengetahuan dengan mengunggah dokumen dan membagikan informasi kedalam sistem Manajemen Pengetahuan dengan penerapan 5 W (*What, Why, When, Where, Who*) dan 1 H (*How*).
16. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang sudah disusun, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan 2023 (Awal)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Effin Martiana**
Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Plh. Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan

Effin Martiana

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	1	Nilai SAKIP KKP (nilai)	82
		2	Persentase Proyek PHLN yang berstatus <i>At Risk</i> (persen)	<50
		3	Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (persen)	90
		4	Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (nilai)	13,32
		5	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP (nilai)	1,7
		6	Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	75
		7	Indeks Perencanaan Tahunan (indeks)	83
		8	Indeks Perencanaan Program dan Anggaran (indeks)	80
		9	Nilai Perencanaan Lintas Sektor (nilai)	83
		10	Indeks Perencanaan Jangka Menengah (indeks)	82,5
		11	Persentase Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (persen)	90
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan (nilai)	93
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	79
		15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (persen)	100
		16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Biro Perencanaan (persen)	75
		17	Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		18	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerjasama Antarlembaga (persen)	100
		19	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama	3.687.239.000
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan BMN	28.912.016.000
3	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	6.126.205.000
Total Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023		38.725.460.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Plh. Sekretaris Jenderal



Effin Martiana

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan



Ishartini

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi 20 Maret 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Effin Martiana**
Jabatan : Pih. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 20 Maret 2023

Pihak Kedua
Pih. Sekretaris Jenderal

Effin Martiana

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	1 Nilai SAKIP KKP (nilai)	82
		2 Persentase Proyek PHLN yang berstatus <i>At Risk</i> (persen)	<50
		3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (persen)	90
		4 Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (nilai)	13,32
		5 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP (nilai)	1,7
		6 Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	75
		7 Indeks Perencanaan Tahunan (indeks)	83
		9 Indeks Perencanaan Program dan Anggaran (indeks)	80
		8 Nilai Perencanaan Lintas Sektor (nilai)	83
		10 Indeks Perencanaan Jangka Menengah (indeks)	82,5
		11 Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (persen)	95
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	12 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75
		13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan (nilai)	93
		14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	79
		15 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (persen)	100
		16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Biro Perencanaan (persen)	75
		17 Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		18 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerjasama Antarlembaga (persen)	100
		19 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama	3.687.239.000
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan BMN	28.912.016.000
3	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	6.126.205.000
Total Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023		38.725.460.000

Jakarta, 20 Maret 2023

Pihak Kedua
Plh. Sekretaris Jenderal



Effin Martiana

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan



Ishartini

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi 13 April 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andy Artha Donny Oktopura**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ari Prabowo**

Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 13 April 2023

Pihak Kedua
Plh. Sekretaris Jenderal

Ari Prabowo

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan

Andy Artha Donny Oktopura

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN

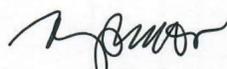
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerja Sama Antarlembaga	1 Nilai SAKIP KKP (nilai)	82
	2 Persentase Proyek PHLN yang berstatus <i>At Risk</i> (persen)	<50
	3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (persen)	90
	4 Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (nilai)	13,32
	5 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP (nilai)	1,7
	6 Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	75
	7 Indeks Perencanaan Tahunan (indeks)	83
	9 Indeks Perencanaan Program dan Anggaran (indeks)	80
	8 Nilai Perencanaan Lintas Sektor (nilai)	83
	10 Indeks Perencanaan Jangka Menengah (indeks)	82,5
	11 Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (persen)	95
2 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	12 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75
	13 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Perencanaan (nilai)	93
	14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	79
	15 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (persen)	100
	16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Biro Perencanaan (persen)	75
	17 Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
	18 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerjasama Antarlembaga (persen)	100
	19 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama	3.687.239.000
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan BMN	28.912.016.000
3	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	6.126.205.000
Total Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023		38.725.460.000

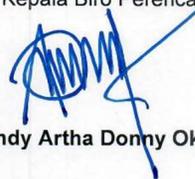
Jakarta, 13 April 2023

Pihak Kedua
Plh. Sekretaris Jenderal



Ari Prabowo

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan



Andy Artha Donny Oktopura

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Revisi 21 November 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andy Artha Donny Oktopura**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 21 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan

Andy Artha Donny Oktopura

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	1 Nilai SAKIP KKP (nilai)	83
	2 Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus <i>At Risk</i> (persen)	<50
	3 Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister (persen)	90
	4 Nilai Komponen RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan (nilai)	13,32
	5 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Maturitas SPIP KKP (nilai)	1,7
	6 Indeks Perencanaan Tahunan KKP (indeks)	83
	7 Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP (indeks)	80
	8 Nilai Perencanaan Lintas Sektor KKP (nilai)	83
	9 Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP (indeks)	83
	10 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP (indeks)	83
2 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Kerja Sama Antar Lembaga	11 Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	75
	12 Persentase Dokumen/ Naskah Kerja Sama yang disetujui Pimpinan Para Pihak (persen)	95
3 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Perencanaan	13 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Biro Perencanaan (nilai)	75
	14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Perencanaan (nilai)	80,5
	15 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan (indeks)	79
	16 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Perencanaan (persen)	100
	17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Perencanaan (persen)	75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	18 Persentase Unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
	19 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Kerjasama Antarlembaga (persen)	100
	20 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi, dan Kerja Sama	2.469.369.000
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan BMN	100.804.052.000
3	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	5.422.790.000
Total Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023		108.696.211.000

Jakarta, 21 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris Jenderal


Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan


Andy Artha Donny Oktopura

Lampiran 5. Hasil Evaluasi AKIP KKP Tahun 2022 oleh KemenPAN RB Nomor B/374/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 65 /AA.05/2023 27 November 2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti **sebagian besar** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu atas dokumen perencanaan kinerja melalui validasi dan analisis SMART terhadap sasaran, indikator, dan target secara berjenjang. Hal ini dikuatkan juga dengan adanya reviu atas peta strategis pada rancangan perubahan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan uji petik atas dokumen perencanaan kinerja pada unit kerja teknis;
- b. Telah melakukan *kick off* penjenjangan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai proses dalam merumuskan penjenjangan kinerja yang akan digunakan oleh Kementerian selama perencanaan kinerja kedepan;
- c. Telah menyusun identifikasi *crosscutting* yang dituangkan dalam pohon kinerja terhadap 5 prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peran Kementerian dalam mengentaskan kemiskinan;
- d. Menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 43 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022;
- e. Melakukan penilaian mandiri atas validitas IKU level II dan usulan matriks penilaian mandiri indikator serta uraian fungsi dari tim kerja yang diusulkan;
- f. Melakukan penambahan fitur pemberian *feedback* perbaikan pada aplikasi Kinerjaku dan telah dimanfaatkan sebagai bentuk pemantauan pimpinan unit kerja atas hasil kinerja yang telah diwujudkan oleh setiap pegawai;
- g. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) secara triwulanan dan menajamkan analisa capaian kinerja pada LAKIP setiap level unit kerja;
- h. Melakukan penambahan fitur Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku sebagai bagian dari proses penilaian *self assessment* oleh unit kerja dan memudahkan inspektorat jenderal dalam melakukan digitalisasi LKE dan memantau tindak lanjut yang telah dilakukan oleh setiap unit kerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kementerian Kelautan dan Perikanan** mendapatkan nilai sebesar **83,65** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	26,84	27,03
b. Pengukuran Kinerja	30	25,20	25,39
c. Pelaporan Kinerja	15	12,45	12,69
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,35	18,54
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,84	83,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Penetapan target kinerja yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama unit kerja teknis di daerah, belum sepenuhnya didasarkan pada hasil realisasi kinerja sebelumnya;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun pohon kinerja dengan memperhatikan isu strategis, ekspektasi kinerja yang diharapkan, serta mengaitkan pohon kinerja tersebut dengan tematik yang berfokus pada 5 prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pola penjenjangan yang sudah disusun tersebut masih perlu disempurnakan, terutama dalam menjabarkan kinerja strategis yang ada pada pohon kinerja tersebut ke level kinerja taktikal maupun operasional dengan memperhatikan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspektasi kinerja yang dimiliki;
- Pemanfaatan penjenjangan kinerja yang sudah disusun sebagai bagian dari proses penentuan tim kerja yang merupakan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 belum sepenuhnya berjalan optimal hingga ke unit kerja teknis di daerah. Hal ini disebabkan pengimplementasiannya masih terpusat di level eselon 1 dan eselon 2 yang berada di pusat saja;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memetakan potensi *crosscutting* kinerja pada beberapa kinerja nasional yang melibatkan stakeholder lain, baik itu dalam menjalankan tematik yang menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun isu kemiskinan yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Namun pemetaan tersebut belum didukung dengan pemantauan hasil yang baik melalui tagging program, sehingga dapat berpotensi saling klaim kinerja dengan pemerintah

daerah.

- Dalam mendukung pelaksanaan INPRES Nomor 4 Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun pohon kinerja dengan memperhatikan perannya dalam mendukung pemberdayaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana kelompok nelayan dan pembudidaya dalam Inpres tersebut. Namun, pemanfaatan pohon kinerja tersebut masih perlu didorong, terutama dalam memastikan penentuan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan telah berdasarkan pohon kinerja tersebut.

2) Pengukuran kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pemanfaatan hasil penilaian kinerja organisasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja individu belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terutama dalam memastikan pengaruh hasil kinerja individu dalam mendukung kinerja organisasi;
- Informasi pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi belum optimal dimanfaatkan, terutama pada proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja yang diberikan dengan kondisi eksisting kinerja pasca hasil pengukuran kinerja berkala.

3) Pelaporan kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pada LAKIP beberapa unit kerja, terkhusus pada unit kerja teknis di daerah, belum diinformasikan secara lengkap terkait faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;
- Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LAKIP, baik di pusat maupun di unit kerja, belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Temuan dan rekomendasi atas hasil evaluasi internal pada unit kerja teknis belum sepenuhnya menginformasikan secara spesifik kendala yang menjadi permasalahan implementasi SAKIP dan upaya yang perlu

4

dilakukan oleh unit kerja teknis agar kualitas implementasi SAKIP di unit kerja pusat sama dengan unit kerja teknis di daerah;

- Mekanisme evaluasi AKIP internal di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan terdapat mekanisme *self assesment* dari unit kerja terlebih dahulu sebelum dilakukan verifikasi oleh APIP sebagai bagian dari proses menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi internal. Namun, hasil dari evaluasi AKIP yang dilakukan secara sistematis tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mendorong perbaikan capaian kinerja pada level kementerian, terutama pada PDRB sektor perikanan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan revaluasi atas target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja di level pusat hingga unit kerja teknis di daerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan kondisi eksisting kinerja menuju masa akhir rencana strategis sehingga target yang dimiliki telah berdasarkan pada kondisi kinerja yang riil dan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki, terutama ketika menjabarkan kinerja dari level strategis ke level kinerja dibawahnya dengan mempertimbangkan hubungan sebab akibat serta kesesuaiannya dengan peran unit kerja teknis dalam mendukung ekspektasi kinerja dan tematik yang dimiliki;
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan penjenjangan kinerja yang dimiliki sebagai alat dalam menentukan tim kerja serta hasil kinerja yang diharapkan sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023. Pengimplementasian tersebut agar tidak hanya dilakukan oleh unit kerja yang di pusat saja, namun dapat dilakukan hingga ke setiap unit kerja teknis yang berada di daerah;
- 4) Mengoptimalkan kualitas pengimplementasian *crosscutting* kinerja pada setiap kondisi yang ingin diwujudkan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, dengan cara melakukan pemantauan berkala atas hasil pelaksanaan dari tagging program yang dimiliki guna memastikan kinerja yang dihasilkan telah sesuai dengan peran dan ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melakukan pemetaan antara hasil kinerja yang menjadi milik Kementerian dan yang dapat diklaim oleh Pemerintah Daerah

- sebagai bagian dari proses mengurangi adanya saling klaim kinerja;
- 5) Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang sudah disusun untuk menjawab kontribusi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan telah berdasarkan pohon kinerja yang sudah disusun tersebut sehingga pemanfaatan pohon kinerja tersebut dapat selaras dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - 6) Mendorong pemanfaatan hasil penilaian kinerja organisasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja individu, terutama dalam memastikan adanya peningkatan signifikan pada realisasi kinerja organisasi berdasarkan hasil kinerja setiap individu;
 - 7) Terus mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan secara berkala sebagai bagian dari proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang masih relevan dengan strategi kinerja yang ada, serta penyesuaian target kinerja unit kerja kedepan;
 - 8) Menyempurnakan kualitas informasi dalam LAKIP unit kerja dengan memastikan setiap unit kerja menginformasikan secara lengkap hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi ketercapaian kinerja serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;
 - 9) Terus mendorong pemanfaatan informasi dalam LAKIP, baik di level pusat maupun unit kerja, terutama dalam proses menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan;
 - 10) Mendorong peningkatan kualitas evaluasi AKIP internal dengan memastikan inspektorat jenderal agar menuangkan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan mengakar langsung pada akar permasalahan implementasi SAKIP setiap unit kerja ke dalam laporan hasil evaluasi internal sehingga unit kerja yang masih rendah nilai SAKIP nya dapat meningkatkan kualitas implementasinya dengan mengacu pada hasil evaluasi tersebut;
 - 11) Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah disampaikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi, kualitas kinerja, serta perbaikan capaian kinerja pada level kementerian, terutama pada PDRB sektor perikanan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lampiran 6. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja “Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus At Risk” Triwulan IV 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja “Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk*” Triwulan IV 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 5 Januari 2024

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU “Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk*”, sebagai berikut:

1. Pinjaman luar negeri, merupakan instrumen pembiayaan pertama yang digunakan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembanguna. Selanjutnya, hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L.
2. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diamanatkan pada:
 - a. PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
 - b. PMK 180/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah
 - c. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4/2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari PHLN.meminta agar setiap K/L selaku *executing agency* untuk menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PHLN per triwulan.
3. Biro Perencanaan melaksanakan rapat Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai PHLN setiap triwulan untuk kemudian dilaporkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.
4. Laporan sebagaimana tersebut butir 3 yang disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian keuangan sebagai bahan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Dalam Negeri, dan PBS.
5. Capaian indikator kinerja “Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk*” adalah **47%** sesuai dengan penilaian mandiri yang dilakukan. Rekapitulasi hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan atas indikator kinerja terlampir.

Lampiran 1. Persentase Proyek PHLN KKP yang berstatus *At Risk*

$$\%PHLN_{at\ risk} = \frac{\sum PHLN_{at\ risk}}{\sum PHLN} \times 100\%$$

$$\%PHLN_{at\ risk} = \frac{9}{19} \times 100\%$$

$$= 47\%$$

No	Hibah/ Pinjaman	Nama Proyek	Donor/ Lender	Status
1	Pinjaman	Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project	ADB	At Risk
2	Pinjaman	Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)	AFD	At Risk
3	Pinjaman	Ocean For Prosperity Project (LAUTRA)	World Bank	Belum Ada Penarikan
4	Pinjaman	Integrated Of Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I	IsDB	Belum Efektif Dan/Atau Persyaratan Penarikan Pertama
5	Pinjaman	Integrated Of Fishing Ports and International Fish Markets-Phase II Preparation Project	ADB	Belum Efektif Dan/Atau Persyaratan Penarikan Pertama
6	Hibah	The Project for Enhancement of Satellite Utilization for Monitoring Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Activity	JICA	At Risk
7	Hibah	The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA): 715, 717 & 718)	WWF-GEF	At Risk
8	Hibah	Program for Development of The Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Islands	JICA	At Risk
9	Hibah	The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands (Phase 2)	JICA	At Risk
10	Hibah	The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation	Republic Of Korea	At Risk
11	Hibah	USAID Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) 497-AA-040 (The Implementation of the USAID Marine And Fisheries Portfolio)	USAID	At Risk
12	Hibah	Implementation Of the Abandoned Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG) Reduce, Reuse, And Recycle Pilot Project in Indonesia	Global Ghost Gear In	At Risk

13	Hibah	Problue Grant And OMC Grant For Oceans for Prosperity Project (LAUTRA)	World Bank	Zero Disbursed Behind Scheduled
14	Hibah	Technical Assistance on Gender Related Issues and Design and Support on The Implementation of Gender Action Plan At Eco Fishing Ports Locations	AFD	Zero Disbursed Behind Scheduled
15	Hibah	Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia	UNIDO	Zero Disbursed Behind Scheduled
16	Hibah	Translating Fish Passage Research Outcomes into Policy and Legislation Across Southeast Asia	ACIAR	Disbursed Behind Scheduled
17	Hibah	Training In Port Management and Fisheries Sector in Indonesia	AFD	Zero Disbursed Behind Scheduled
18	Hibah	Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesian Seas	FAO	Zero Disbursed Behind Scheduled
19	Hibah	Implementation Of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Programs (ATSEA-2); Second Phase of The Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program: Indonesia National Component	UNDP	Zero Disbursed Behind Scheduled

Lampiran 7. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri Hal
Penyampaian Capaian Indikator Kinerja “Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri
yang teregister” Triwulan IV 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pendanaan Luar Negeri
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja “Persentase Dokumen
Pendanaan Luar Negeri yang teregister” Triwulan IV 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 5 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU “Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister”, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan **PP 10 Tahun 2011 Pasal 74 ayat (3)** bahwa Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan. Registrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sebelum melakukan pengesahan. Satker penerima PHLN harus memiliki **nomor register** atas PHLN yang diterima untuk mengesahkan dan melaporkan PHLN dalam laporan keuangan
2. Pendanaan Luar Negeri KKP terdiri dari Pinjaman dan Hibah. IKU ini akan mengukur persentase dokumen pendanaan luar negeri yang teregister.
3. Proses registrasi hibah dilakukan melalui aplikasi kemenkeu Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI). Aplikasi ini digunakan untuk proses pengusulan hibah sampai dengan terbitnya persetujuan register oleh Kemenkeu. Selanjutnya, proses registrasi Pinjaman dilakukan secara manual kepada Kemenkeu hingga terbitnya persetujuan register.
4. KKP menerapkan kebijakan satu pintu sehingga setiap satker penerima PHLN akan melakukan permohonan pengajuan nomor register PHLN melalui Biro Perencanaan. Biro Perencanaan akan melakukan proses registrasi melalui aplikasi SEHATI untuk Hibah Luar Negeri (HLN) dan permohonan secara manual untuk nomor register Pinjaman Luar Negeri (PLN). Proses bisnis registrasi Hibah berdasarkan SEHATI terlampir.
5. Capaian indikator kinerja “Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister” adalah **100%** sesuai dengan surat register dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Rekapitulasi hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan atas indikator kinerja terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Benny Khairuddin

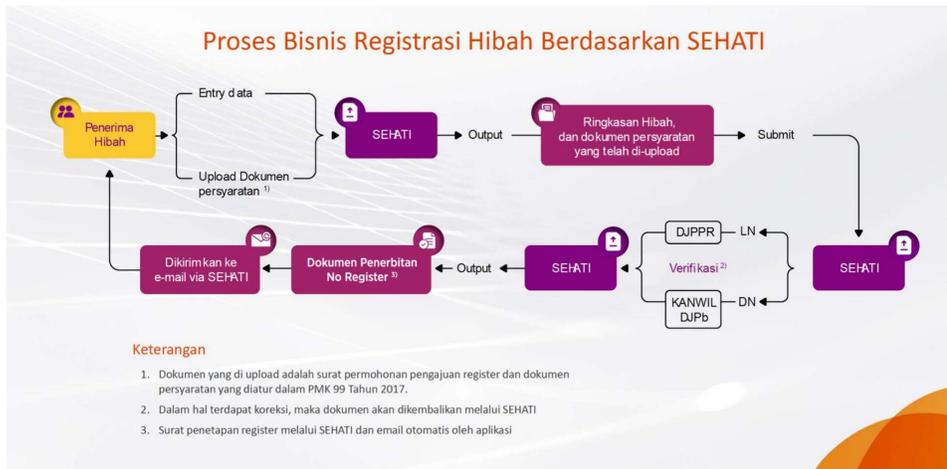
Lampiran 1. Persentase Dokumen Pendanaan Luar Negeri yang teregister

$$\%PHLN_{reg} = \frac{\sum PHLN_{reg}}{\sum Usulan_{reg}} \times 100\%$$

$$\%PHLN_{reg} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

No	Hibah/Pinjaman	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal
1	Hibah	S-659/PR.8/2023	5 Oktober 2023	Penerbitan Register Nomor 23EGGSYA (Hibah Global Quality and Standards Programme (GQSP) Indonesia)
2	Hibah	S-718/PR.8/2023	15 November 2023	Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Pinjaman	S-808/PR.8/2023	27 November 2023	Penerbitan Nomor Register Pinjaman untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran 2. Proses Bisnis Registrasi Hibah berdasarkan SEHATI



Lampiran 8. Memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1778/SJ.3/OT.710/X/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Capaian Nilai Komponen RB KKP capaian Triwulan IV lingkup Sekretariat Jenderal

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM

Nomor 1778/SJ.3/OT.710/X/2023

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Humas dan KLN
5. Kepala Biro Umum dan PBJ
6. Plt. Kepala Pusdatin
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Hal : Penyampaian Capaian Nilai Komponen RB KKP capaian Triwulan IV lingkup Sekretariat Jenderal
Tanggal : 31 Oktober 2023

Sehubungan dengan Memorandum Kepala Biro Perencanaan nomor 894/SJ.1/TU.140/X/2023, hal: Penyampaian Hasil Rapat Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan III Tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2023, bersama ini disampaikan sebagai berikut

- berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, nilai hasil evaluasi dengan indeks reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah 78,43 dengan kategori "BB"; dan
- adapun capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

No.	Nama Unit Organisasi	Target	Capaian TW IV 2023
1.	Biro Perencanaan	13.32%	14.31%
2.	Biro Keuangan *	3.45%	3.66%
3.	Biro SDMAO	19.18%	20.33%
4.	Biro Hukum	4.32%	4.58%
5.	Biro Humas dan KLN	3.70%	3.92%
6.	Biro Umum dan PBJ*	1.23%	1.31%
7.	Pusdatin	13.88%	14.71%

* Non PJ Area RB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik

Riza Trianzah

Tembusan
Sekretaris Jenderal

Lampiran 9. BA Pembahasan Laporan Hasil PM Maturitas SPIP Terintegrasi KKP 2022 dan 2023 Nomor B.135/ITJ.1/HP.520/VIII/2023 Tanggal 3 Agustus 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAN www.kkp.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022 DAN 2023

Nomor : B.135/ITJ.1/HP.520/VIII/2023
Tanggal : 3 Agustus 2023

Pada Hari ini, Kamis tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-08-2023), kami selaku Tim Asesor dan Ketua Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan 2023, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 99 Tahun 2023 dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 27 Tahun 2023, telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Juli 2022 s.d. Juni 2023, dan telah dilakukan pembahasan terhadap seluruh komponen penilaian, sehingga diperoleh kesepakatan nilai hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

Komponen dan Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Bobot Unsur (%)	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50	2.000	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50	2.500	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100	4.500	
BOBOT PERENCANAAN	40		1.800
STRUKTUR DAN PROSES			
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100	4.104	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30		1.231
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20	1.000	
Capaian <i>Output</i>	10	0.500	
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25	0.750	

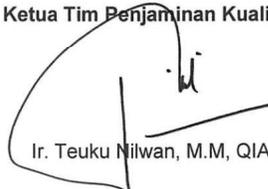
Komponen dan Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Bobot Unsur (%)	Skor	Nilai
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Aset	25	0.750	
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20	0.400	
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100	3.400	
BOBOT HASIL	30		1.020
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4.051
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			3.975
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI			3.710

Demikian Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan 2023 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

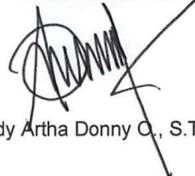
Ketua Tim Asesor


Setyawati, S.Sos., M.Ak., CFA

Ketua Tim Penjaminan Kualitas


Ir. Teuku Nilwan, M.M, QIA

Wakil Ketua I Tim Asesor


Dr. Andy Artha Donny O., S.T., M.T., M.Eng.

Wakil Ketua II Tim Asesor


Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si

Lampiran 10. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Program dan
Anggaran Hal Capaian IKU Tim Kerja PPA Triwulan IV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Program dan Anggaran
Hal : Capaian IKU Tim Kerja PPA Triwulan IV
Lampiran : satu berkas
Tanggal : 22 Desember 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan capaian IKU Tim Kerja Pengelolaan Program dan Anggaran yang terdiri dari: (1) Indeks Perencanaan Tahunan KKP (indeks) dan (2) Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP (indeks).

Kedua IKU tersebut untuk mengukur sinkronisasi dan sinergitas proses perencanaan dan dokumennya dari *Forward Estimate*, Rencana Kerja hingga RKA-KL sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja K/L.

Indikator Indeks Perencanaan Tahunan dan Indeks Perencanaan Program dan Anggaran adalah (1) Persentase keselarasan kegiatan pada KRISNA Renja KKP dengan RKA K/L SAKTI KKP; (2) Persentase keselarasan kegiatan Rencana Kegiatan (RK) DAK Pagu Alokasi dengan RK Final; (3) Persentase keselarasan nomenklatur kinerja dan indikator subkegiatan urusan KP di Daerah; (4) Persentase keselarasan nomenklatur DAK urusan KP; (5) Persentase keselarasan dokumen RKP dengan dokumen RKPD; (6) Persentase Program KKP yang masuk dalam Prioritas Nasional; (7) Persentase Kegiatan DAK bidang KP dalam APBN; (8) Persentase Kesesuaian Kegiatan PN dalam Renja dan RKA-K/L. Sehingga didapat nilai indeks sebagai berikut:

- a. Indeks Perencanaan Tahunan KKP : 89,01
- b. Indeks Perencanaan Program dan Anggaran KKP : 81,41

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Muhammad Ramli

Lampiran 11. Memorandum Ketua Tim Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Perencanaan Lintas Sektor Triwulan IV Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR.

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Kepala Tim Kelompok Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Perencanaan Lintas Sektor Triwulan IV Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan IV Biro Perencanaan Tahun 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan Capaian IKU "Nilai Perencanaan Lintas Sektor" sebagai berikut:

Nilai Perencanaan Lintas Sektor mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) Perencanaan Lintas Sektor. Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 mengamanatkan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan yang terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakteristik di setiap wilayah. KKP mendukung perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor tersebut melalui kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian target-target nasional.

Nilai perencanaan lintas sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator keberhasilan perencanaan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini dihitung berdasarkan 3 (tiga) faktor yaitu (1) Proses pembahasan, (2) Penyelesaian dokumen, dan (3) Penyampaian tepat waktu.

Capaian Indikator Kinerja "Nilai Perencanaan Lintas Sektor" sebesar **83**. Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan atas IK Nilai Perencanaan Lintas Sektor terdapat pada Lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



Agus Haryanto

Lampiran. Nilai Perencanaan Lintas Sektor

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Tindak Lanjut KKP			Nilai
		Pemba- hasan	Penyelesaian Dokumen	Penyampaian Tepat Waktu	
		30	40	30	
1	Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Laut Tahun 2023	30	40	0	70
2	Kegiatan Sinergitas Antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme	30	40	30	100
3	Renaksi Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	30	40	30	100
4	Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres 2/2021 dan Inpres 1/2022 (Jamsostek dan JKN)	30	40	30	100
5	Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	0	40	0	40
6	Renaksi Pelayanan Kepemudaan 2021 – 2024	0	40	0	40
7	Monev Renaksi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	30	40	30	100
8	Renaksi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024	30	40	30	100
9	Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark tahun 2022-2023	30	40	0	70
10	Rencana Aksi P4GN	30	40	30	100
11	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	30	40	0	70
12	Pengarusutamaan Gender	30	40	30	100
13	RAN Peningkatan Peringkat TTDI	30	40	30	100
14	Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA	30	40	0	70
Total					1160
Nilai Perencanaan Lintas Sektor					83

Lampiran 12. Memorandum Ketua Tim Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR: /SJ.1/RC.220//2024

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Ketua Tim Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP Tahun 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan capaian IKU Indeks Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Perencanaan KKP dengan bobot 40%. Indeks ini mengukur kinerja penyusunan perencanaan jangka menengah Kementerian. Perhitungan indeks ini dilakukan oleh Biro Perencanaan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut: 1). Keselarasan/kesesuaian sasaran dan indikator kinerja jangka menengah KKP (Level 0) dengan RPJMN, 2). Keselarasan/kesesuaian Program KKP dengan Program Prioritas Nasional 3). Keselarasan/kesesuaian Sasaran dan indikator sasaran program pada Renja KKP dengan Renstra KKP;
2. Formulasi perhitungan indeks ini adalah sebagai berikut:

FORMULASI PERHITUNGAN

$$I_{pjm} = \frac{(20\% \times A) + (10\% \times B) + (10\% \times C)}{40\%}$$

A= Keselarasan indikator kinerja jangka menengah KKP (Level 0) dengan RPJMN,
B= Keselarasan/kesesuaian Program KKP dengan Program Prioritas Nasional,
C= Keselarasan/kesesuaian Sasaran dan indikator sasaran program pada Renja KKP dengan Renstra KKP.

2

3. Capaian IKU Indeks Perencanaan Jangka Menengah KKP pada tahun 2023 adalah sebesar 85,66% dari hasil rekapitulasi penilaian mandiri yang telah dilakukan sebagaimana terlampir pada tautan https://bit.ly/Indek_Jangka_Menengah_KKP_2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



Ade Wiguna Nur Yasin

Lampiran 13. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor
73/SJ.1/KS.310/I/2024 Hal Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama KKP
dan Mitra Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor: 73/SJ.1/KS.310/I/2024

Yth. : 1. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
3. Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya
4. Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP
5. Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Perencanaan

Hal : Pengukuran Capaian Implementasi Kerja Sama KKP dan Mitra
Periode Pelaporan Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 12 Januari 2024

Dalam rangka pengukuran capaian implementasi kerja sama lingkup KKP periode pelaporan triwulan IV Tahun 2023, yang telah dilaksanakan di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, pada tanggal 11-12 Januari 2024, bersama ini disampaikan hasil sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian implementasi kerja sama lingkup KKP periode pelaporan triwulan IV Tahun 2023 dilakukan terhadap seluruh hasil kerja sama (*output* dan *outcome*) pada masing-masing unit kerja eselon I.
2. Berdasarkan hasil pengukuran implementasi kerja sama periode triwulan IV Tahun 2023, rata-rata mencapai 87,03% dari target 75 % (rekapitulasi terlampir).
3. Adapun untuk capaian Persentase Dokumen Kerja Sama yang disetujui pimpinan para pihak Tahun 2023, mencapai 100% dari target 95%.
4. Selanjutnya hasil capaian implementasi kerja sama, akan dijadikan sebagai data capaian dalam pengisian pada aplikasi kinerjaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Andy Artha Donny Oktapura

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal.

Lampiran 14. Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor
118/SJ.2/TU.210/I/2024 Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI WBK WBBM
di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 118/SJ.2/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Dari : Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim Penilai Mandiri
Pembangunan ZI WBK WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Tahun 2023
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI WBK WBBM di
Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tanggal : 11 Januari 2024

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekretariat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mencapai 83,97
2. Biro Perencanaan mencapai 82,70
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mencapai 81,34

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Lampiran 15. Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor
1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II
Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023

Kepada : 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kepala Biro Umum dan PBJ
4. Kepala Biro Humas dan KLN
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
7. Direktur LPMUKP
8. Kepala BPISDKP

Dari : Kepala Biro Perencanaan
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal
Tahun 2023
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Desember 2023

Dalam rangka Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri dilakukan berpedoman pada Permen PAN RB 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup evaluasi mencakup :
 - a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
 - b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
 - c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
2. Penilaian Mandiri level II Lingkup Setjen telah dilakukan bersama dengan Inspektorat I dengan melakukan verifikasi terhadap 4 komponen penilaian Evaluasi SAKIP dengan menggunakan aplikasi kinerja yang memiliki bobot masing-masing komponen. Hasil verifikasi sebagai berikut :

a. Komponen dan Bobot Penilaian

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja				
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
Total	20	30	50	100

Sumber: Hasil Verifikasi PM SAKIP di Aplikasi Kinerjaaku

b. Hasil Verifikasi Penilaian Mandiri

No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas				Nilai Akuntabilitas	Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

3. Untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepan, hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama antara lain :
 - a. Mendorong penyempurnaan perencanaan kinerja untuk lebih memastikan adanya keselarasan perencanaan kinerja antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, merumuskan tujuan dan sasaran yang berorientasi outcome pada level kinerjanya dan indikator kinerja yang lebih SMART untuk mengukur keberhasilan kinerja yang ditetapkan dan menetapkan target kinerja yang lebih realistis dan *achievable*.
 - b. Mereviu kembali penjenjangan kinerja untuk memastikan hubungan antara level kinerja disusun dengan mempertimbangkan CSF (*Critical Success Factor*) dengan cara memastikan tidak terjadi penetapan kinerja yang

Lampiran 16. Memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor:
85/SJ.3/KP.720/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Capaian Indikator
Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 85/SJ.3/KP.720/I/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi.
3. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2023 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Lampiran : Satu Lampiran

Tanggal : 11 Januari 2024

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Semester II Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Semester II Tahun 2023, berdasarkan hasil penutupan pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2024 yaitu **84.75** (kategori **Tinggi**) terdiri dari **Kualifikasi 21.49 Kompetensi 33.41 Kinerja 24,84 dan Disiplin 5.00** dari Target sebesar **80** (kategori **Sedang**); lampiran
2. Berdasarkan Surat Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1490/SJ.3/KP.720/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 perihal Penyesuaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, maka terjadi peningkatan dari capaian IP ASN KKP Tahun 2023, dikarenakan penyesuaian dimensi sebagai berikut:
 - a. kualifikasi sesuai jenjang jabatan;
 - b. kompetensi diklat 20 JP dapat dihitung secara proporsional;
 - c. hukuman disiplin perhitungan dari awalnya 5 (lima) tahun menjadi 1 (satu) tahun sebelumnya; dan

- d. keikutsertaan Pelatihan Diklat Perjenjangan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Unit Kerja lebih di optimalkan dan dikoordinasikan kepada unit penyelenggara Diklat di KKP.
3. Target Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Sekretariat Jenderal untuk Tahun 2024 yaitu Target **Semester 1** sebesar **80** (Kategori **Sedang**) dan Target **Semester 2** atau **Akhir Tahun 2024** sebesar **85** (kategori **Tinggi**).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riza Trianzah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

C. Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

Sebelumnya:

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Saat ini:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

D. Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

Lampiran 17. Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor
1717/SJ.2/RC.610/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 1717/SJ.2/RC.610/X/2023

Yth. : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
6. Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
8. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Keuangan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022"

Tanggal : 12 Oktober 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan III Tahun 2023 dan berkenaan dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" dan "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP", bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Tahun 2022 yang dibandingkan dengan besarnya realisasi anggaran Unit Kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2022.
2. Berkenaan dengan temuan di lingkup Sekretariat Jenderal pada Tahun 2022 bersifat manajerial tidak ada yang bernilai material maka capaian IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022" sebesar 0,01% (target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$).

3. ...

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

2

3. Capaian IKU "Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022" mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan terutama pertanggungjawaban belanja, agar laporan keuangan dapat disajikan secara memadai baik dari segi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Lampiran 18. Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor
86/SJ.2/TU.210/I/2023 Tanggal 10 Januari 2024 Rekomendasi Hasil

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 86/SJ.2/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Badan Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal Nomor B.267/ITJ.1/HP.510/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Setjen, dapat kami sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2023, bersama ini disampaikan Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" periode Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 99.12% (telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 112 rekomendasi dari 113 rekomendasi).
2. Pencapaian ini diperoleh berdasarkan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Unit Kerja Lingkup Setjen pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan Desember 2023.
3. Capaian IKU dari masing-masing Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Setyawati

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Memorandum
Nomor : 86/SJ.2/TU.210/I/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1.	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2.	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3.	Biro Umum dan PBJ	18	18	100,00	0	00,00
4.	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5.	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6.	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7.	PUSDATIN	7	7	100,00	0	00,00
8.	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
TOTAL		113	112	99,12	1	00,88

Lampiran 19. Memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Nomor 20/SJ.7/TU.210/I/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Hal Capaian IKU MP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 20/SJ.7/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Humas Kerjasama Luar Negeri
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Biro Umum dan PBJ
7. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Hal : Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2023

Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Tanggal : 3 Januari 2024

Dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian akhir IKU MP Sekretariat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2023:

1. Penilaian capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2023 menggunakan *platform* Portal *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).
2. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar **133,33%**. Capaian tersebut diperoleh dari 7 (tujuh) satuan kerja dan LPMUKP dengan nilai masing-masing **133,33%**.
3. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal pada Tahun 2023 adalah sebesar **112,59%**. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023. Nilai tertinggi adalah sebesar **116,67%** berhasil dicapai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Pusat Data, Statistik dan Informasi.
4. Target capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebesar 92%.

Lampiran 20. Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024
Tanggal 2 Januari 2024 Hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Prosun

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dari : Kepala Biro Hukum

Hal : Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II

Tanggal : 2 Januari 2024

Sehubungan dengan berakhirnya penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan periode semester II (Juli-Desember) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan perhitungan capaian IKU persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut

1. penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154 Tahun 2023;
2. capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
3. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154 Tahun 2023, terdapat 73 (tujuh puluh tiga) usulan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) rancangan Peraturan Menteri dan 19 (sembilan belas) rancangan Keputusan Menteri, dimana hingga semester II terdapat 73 (tujuh puluh tiga) rancangan yang sudah selesai, terdiri atas 54 (lima puluh empat) Peraturan Menteri dan 19 (sembilan belas) Keputusan Menteri, sehingga capaiannya sebesar **100% (seratus persen)**

Lampiran 21. Memorandum Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Nomor:
61/SJ.1/KU.520/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Penyampaian Capaian
Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM

Nomor: 61/SJ.1/KU.520/I/2024

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Penyampaian Capaian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun
Anggaran 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Januari 2024

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan Capaian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi akrual aplikasi SAKTI Per 31 Desember 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Haryanto

Laporan Kinerja Tahun 2023
Biro Perencanaan

Lampiran

Nomor : 61/SJ.1/KU.520/II/2024

Hal : Penyampaian Capaian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023

Tanggal : 10 Januari 2024

Capaian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA (Rp)
2322.AEC.002 - Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga	2.332.369.000	2.302.091.631	98,70%	30.277.369
2325.EBD.952 -Layanan Perencanaan dan Penganggaran	97.521.285.000	97.291.319.602	99,76%	229.965.398
2325.EBD.953 -Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.099.918.000	4.082.961.574	99,59%	16.956.426
2328.EBA.962.056 -Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Biro Perencanaan	2.564.434.000	2.550.814.491	99,47%	13.619.509
2328.EBA.994.002.O - Operasional dan Pemeliharaan Kantor Biro Perencanaan	1.978.205.000	1.944.098.638	98,28%	34.106.362
TOTAL	108.496.211.000	108.171.285.936	99,70%	324.925.064



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Haryanto